

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA *FRAUD* DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)**

Oleh :

Rida Hayani

NIM. 0502161005

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA *FRAUD* DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

Rida Hayani

NIM. 0502161005



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rida Hayani**

NIM : 0502161005

Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung tiram, 20 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Gg. Laksana Dusun 1 Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram Kab.
Batu Bara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



Rida Hayani

NIM.0502161005

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA *FRAUD* DI SEKTOR PEMERINTAHAN
(Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)**

Oleh :


Rida Hayani

NIM. 0502161005

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 29 Desember 2020

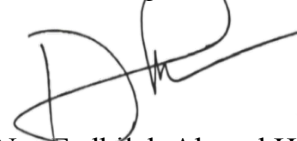
Pembimbing I



Dr. Nurlaila, MA

NIDN. 2021057503

Pembimbing II

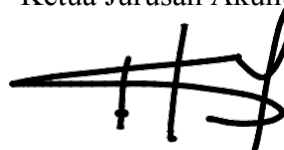


Nur Fadhlilah Ahmad Hsb, M.Ak

NIB. 1100000036

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



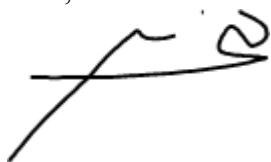
Hendra Harmain, SE., M.Pd

NIDN. 2010057302

Skripsi berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)” an. Rida Hayani, NIM 0502161005 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sdang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 22 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 22 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Dr. H. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris,



Kusmilawaty, S.Ak., M.Ak
NIDN. 2014068001

Anggota

Pembimbing I



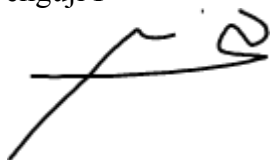
Dr. Nurtaila Harahap, SE, MA
NIDN. 2021057503

Pembimbing II



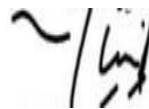
Nur Fadilah Ahmad Hsb, M.Ak
NIDN. 1100000036

Penguji I



Dr. H. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIDN. 2001077903

Penguji II



Arnida Wahyuni Lubis, M.Si
NIDN. 2016068403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Rida Hayani (2020) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)” di bawah bimbingan Dr. Nurlaila, MA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan metode *purposive sampling*, total sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan hasil kuesioner diterima kembali untuk diolah. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa perilaku tidak etis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, serta hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dengan koefisien determinasi 24,9%. Dari pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, *Fraud* di Sektor Pemerintahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memberikan penulis kesehatan, kekuatan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)”**. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya dan cahaya penerang bagi umatnya. Semoga dengan seringnya kita bershalawat kepada beliau, maka kita termasuk kedalam jajaran umat Nya yang mendapatkan naungan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) bagi mahasiswa program Strata Satu (S1) di jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, materil, dan spiritual, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa kepada :

1. Kedua orang tua yang paling saya sayangi dan cintai yang senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi Ananda yaitu Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Nurhafsyah Damanik yang dengan ikhlas memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang yang tidak pernah putus, selalu mencurahkan perhatian,

cinta, bimbingan, nasihat, serta dukungan moril maupun materil serta doa tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Harmain, SE.,M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Kusmilawaty, SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Nurlaila, SE.,MA selaku Penasehat Akademik dari Semester I-VIII, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan pemahaman dalam menyelesaikan akademik. Sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan dan nasihat, serta saran dalam membimbing penulis.
7. Ibu Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan dan nasihat serta saran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
9. Para pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
10. Kepada kakak, abang, dan adik-adikku tersayang, Rita Zahara, Haris Sakban, Rika Syahara, Muhammad Badri, dan Khairul Umbri, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan akademik ini.
11. Kepada nek uwo dan Alm. M.Yusuf Damanik (atok) yang penulis cintai serta seluruh keluarga penulis yang ada di kampung halaman yang selalu mendoakan

kesuksesan untuk penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada seluruh personil Sumayyah, Umi Kalsum Nasution, Ayu Andira, Sri Rahayu, Husnul Hayati, Rizki Ramadhani, Nurasiyah, Aisyiah Zega yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungannya kepada penulis. Serta Jumiah teman yang selalu bisa diajak berjuang, yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungannya kepada penulis.
13. Kepada seluruh BPH dan Pengurus KAMMI Merah Saga, Ukh Monika, Sari, Ros, Nining, Khaula, Muti, dan yang lainnya yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungannya kepada penulis.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan AKS-A Stambuk 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaannya selama 4 tahun belakangan ini. Semoga kita semua sukses kedepannya, Aamiin..

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis, dan penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 29 Desember 2020

Penulis

Rida Hayani

NIM.0502161005

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	10
1. <i>Fraud</i>	10
2. <i>Fraud Tree</i> atau Peta Kecurangan	10
3. <i>Fraud Triangle</i>	12
4. <i>Fraud</i> di sektor Pemerintahan.....	15
5. <i>Fraud</i> dalam Perspektif Islam.....	16
6. Perilaku Tidak Etis.....	22
7. Sistem Pengendalian Internal.....	23
8. Kesesuaian Kompensasi.....	26
B. Penelitian Sebelumnya	31
C. Kerangka Teoritis	37
D. Hipotesa.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Data Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Definisi Operasional	45
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.....	56
1. Profil Dinas BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	56
2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara	57
3. Tugas Pokok BPKAD Provinsi Sumatera Utara	58
4. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	71
B. Deskripsi Data Penelitian	72
1. Karakteristik Responden	73
2. Deskripsi Variabel.....	77
C. Uji Persyaratan Analisis	84
1. Uji Validitas	84
2. Uji Reliabilitas	86
D. Uji Asumsi Klasik	86
1. Uji Normalitas.....	86
2. Uji Heteroskedastisitas.....	88
3. Uji Multikolinieritas.....	89
4. Uji Linearitas.....	91
5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	91
E. Uji Hipotesis	93
1. Uji Koefisien Determinan (R^2).....	93
2. Uji t	94
3. Uji F	96
F. Interpretasi Hasil Penelitian.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	31
3.1 Waktu Penelitian	41
3.2 Skor Penilaian	44
3.3 Operasional Variabel Penelitian	45
4.1 Data Sampel Penelitian	73
4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	74
4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	75
4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	76
4.6 Distribusi Jawaban Responden Perilaku Tidak Etis.....	77
4.7 Distribusi Jawaban Responden Sistem Pengendalian Internal.....	78
4.8 Distribusi Jawaban Responden Kesesuaian Kompensasi.....	80
4.9 Distribusi Jawaban Responden <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan	82
4.10 Hasil Uji Validitas	84
4.11 Hasil Uji Reliabilitas	86
4.12 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov	88
4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	89
4.14 Hasil Uji Linearitas	91
4.15 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	92
4.16 Hasil Uji R^2	94
4.17 Hasil Uji t	95
4.18 Hasil Uji F	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 <i>Fraud Triangle</i>	12
2.2 Kerangka Konseptual	39
4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	72
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot.....	87
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Surat Penelitian	106
2. Kuesioner Penelitian	108
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	114
4. Hasil Jawaban Responden.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini banyak mengalami perkembangan, diantaranya terdapat di perusahaan swasta maupun pemerintahan yang semakin berkembang, sehingga permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Melihat adanya kemajuan perekonomian di era ini selain membawa manfaat bagi masyarakat, juga bisa menjadi sumber masalah. Salah satu permasalahannya ialah kecurangan atau *fraud*. *Fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja, pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan atau mengubah suatu asset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan dan hukum yang berlaku.

Banyak kasus *fraud* yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan terutama birokrasinya yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Hal ini kemudian mengakibatkan beberapa pelaku *fraud* banyak melakukan tindakan kecurangan.

Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di instansi pemerintahan yaitu korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan

gratifikasi. Peringkat pertama korupsi ini terjadi dikalangan Birokrasi, DPRD, dan Kepala Daerah.¹

IAI mengatakan Kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga melibatkan orang-orang yang dibawahnya, seperti memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark up yang dapat merugikan keuangan negara dan hal ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang surplus.²

Salah satu contoh kasus korupsi di Sumatera Utara yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan bahwa empat anggota DPRD Sumatera Utara, terbukti bersalah menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara. Terbukti suap yang diterima keempat anggota DPRD tersebut masing-masing Rp477,5 juta, Rp960 juta, Rp835 juta, dan Rp504,5 juta. Uang tersebut diberikan agar keempat anggota DPRD Sumut tersebut memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013. Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 DAN 2015 serta APBD Perubahan TA 2014.³ Kasus yang sama, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara untuk

¹ Syahriani Usman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 1.

² Deviana Sari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung : Persepsi Pegawai Pemerintahan" (Tesis, Universitas Lampung, 2016), h. 2.

³ Rhendi Umar, "Terbukti Korupsi Empat Anggota DPRD Sumut Dipenjara 4 Tahun Penjara", <https://www.manado.tribunnews.com>. Diunduh pada tanggal 09 Februari 2020.

menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014.¹

Korupsi juga bukan hanya didefinisikan dengan pegawai yang mencuri uang daerah atau uang negara tetapi termasuk perbuatan-perbuatan koruptif. Seperti sering nitip absen, pulang lebih cepat, dikantor tidak ada kegiatan, tidak kerja, tidur serta bermain game saat jam kantor. “Kita mendorong daerah-daerah untuk menciptakan standar minimal pelayanan atau standar kinerja untuk setiap pegawai. Pegawai yang berkinerja baik layak dihargai lebih dibandingkan pegawai yang tidak berkinerja. Pemerintah membayar gaji pegawai karena kinerjanya bukan karena absensinya,” kata Alexander Marwata saat menjadi narasumber talkshow di Operation Room Graha Adiguna, Selasa, 23 Oktober 2018.²

Contoh kasus lainnya yaitu, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan dalam temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2007 mendapat opini dari BPK RI “Tidak Wajar (TW)”, pada tahun 2008-2013 BPK RI memberi opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, dan pada tahun 2014-2018 BPK RI memberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.³ Berdasarkan opini tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kenaikan yang signifikan, terutama mendapat opini WTP selama 5 kali pada tahun 2014-2018 akan tetapi opini WTP bukan berarti benar tanpa pengecualian karena BPK masih menemukan permasalahan yang masih harus ditindaklanjuti dan dicari solusinya.

¹ Puteranegara Batubara, “Terjerat Suap APBD, 7 Anggota DPRD Sumut Segera Diseret ke Meja Hijau”, <http://nasional.okezone.com>. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2020.

² Prayitno, KPK : Pegawai Titip Absen Pecat Saja”, <http://www.rmoljateng.com>. Di unduh pada tanggal 22 September 2020.

³ “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2006-2018”, <http://www.bpk.go.id>. Di unduh pada tanggal 22 September 2020.

Temuan atas sistem pengendalian internal, antara lain :¹

1. Pergeseran Anggaran Rincian Obyek Belanja 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja (SatKer) tidak ditetapkan melalui Peraturan Daerah perubahan APBD.
2. Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT. Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman tidak sesuai ketentuan.
3. Penataan Aset Tetap belum memadai, antara lain permasalahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian aset, dan pencatatan aset.

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, yang merupakan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, realisasi kegiatan kunjungan kerja tidak sesuai senyatanya, belanja perjalanan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap, dan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap. Atas kerugian tersebut telah dipulihkan dengan penetapan piutang.
2. Pelaksanaan pekerjaan pada 8 (delapan) OPD/SatKer tidak sesuai kontrak, yang meliputi kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran. Selain itu, terdapat jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, dan denda keterlambatan belum dikenakan pada 6 (enam) OPD/SatKer.

Berdasarkan contoh kasus diatas, sejalan dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai masih banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi bukan hanya disebabkan oleh mental serakah dan haus kekuasaan. Tetapi banyak korupsi terjadi disebabkan masih lemahnya sistem

¹ “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018”, <http://www.medan.bpk.go.id>. Di unduh pada tanggal 22 September 2020.

tata kelola pemerintahan.¹ Dapat dianalisis pula, bahwa dalam melakukan kecurangan tersebut, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang berbeda-beda. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle*.

Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Terjadinya ketiga faktor diatas disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dilihat melalui Teori *Fraud Triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey mengatakan bahwa “*fraud* disebabkan oleh tiga hal, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).”

Pressure adalah tekanan situasional yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Dalam beberapa penelitian, ada beberapa hal yang terkait dengan tekanan (*pressure*) yaitu : ketidakpuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, penghasilan kurang, kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu tekanan (*pressure*) dengan adanya kepuasan kompensasi yang didukung dengan teori Greenberg tentang keadilan interaksional.

Menurut Wexley dan Yuki, adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja.² Bagi seorang pegawai,

¹ Ihsanuddin, “Mendagri Nilai Korupsi di Daerah Bisa Terjadi Karena Kelemahan Sistem”, <http://kompas.com>. Diunduh pada tanggal 15 April 2020.

² Wexley dan Yuki, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalita*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), h. 133.

kompensasi merupakan suatu outcome atau reward yang penting. Sehingga dapat diasumsikan, semakin rendah kepuasan kompensasi yang diterima, maka semakin tinggi tingkat korupsi.¹

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini.

Beberapa penelitian yang terkait dengan *opportunity* (kesempatan) diantaranya yaitu : kepatuhan terhadap pengendalian internal yang rendah dan asimetri informasi. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu *opportunity* (kesempatan) dengan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal birokrasi pemerintah akan memberikan pengaruh terjadinya kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin baik pengendalian internal birokrasi pemerintahan, maka semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah.²

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Beberapa penelitian yang terkait dengan rasionalisasi (pembenaran) yaitu : kultur organisasi, dan perilaku tidak etis. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu rasionalisasi dengan perilaku tidak etis. Dallas menyatakan bahwa berbagai kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xeros, dan lain-lain di USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Demikian pula

¹ Firma Sulistyowati. "Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi" dalam Jurnal JAAI Vol. 11, no. 1, Juni 2007, h. 50.

² Wilopo. "Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan" dalam Jurnal Ventura Vol. 11, no. 1, April 2008.

CIMA berpendapat bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi.¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai yang bekerja di BPKAD untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Gubernur Sumut H. Gatot pujo Nugroho, S.T, M.Si pada tahun 2015.
2. Sistem pengendalian internal yang kurang efektif mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan, di lihat dari banyaknya temuan BPK dalam APBD tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Masih banyak pegawai yang titip absen atau hadir untuk sekedar absen, tetapi tidak melaksanakan tugasnya, mendapatkan kompensasi yang sama dengan pegawai yang bekerja dengan baik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi penelitian ini pada variabel bebas dan terikat. Variabel bebas (mempengaruhi) diantaranya yaitu perilaku tidak etis (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), dan pemberian kompensasi (X_3). Sedangkan variabel terikat (dipengaruhi)

¹ Ibid., h.14

yaitu *fraud* (kecurangan) yang akan diteliti oleh penulis dengan responden pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
4. Apakah perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada, dan dapat menambah pengetahuan mengenai *fraud* di sektor pemerintahan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai *fraud* di sector pemerintahan dan memiliki kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi pemerintahan

Bagi pemerintahan khususnya Sumatera Utara adalah untuk memberikan kontribusi agar pemerintah dapat mendeteksi dan melakukan tindak pencegahan lebih dini untuk meminimalisir kasus *fraud* agar dapat terwujud tujuan pemerintah menjadikan Sumut bermartabat, sesuai Visi Gubernur Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Fraud*

Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, serta penyalahgunaan kepercayaan, dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk mengambil keuntungan baik berupa uang, barang/harta, jasa, atau upaya dalam memenangkan proses bisnis.¹

Dalam buku *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, *Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam standarnya, menjelaskan *fraud* dengan menyatakan bahwa: “*Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside organization.*” [Suatu kesatuan penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja, yang dapat dilakukan oleh dan untuk keuntungan bagi organisasi dan atau individu, baik di dalam maupun di luar organisasi.]²

Dalam buku *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen*, Raswin mengatakan *Fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.³

2. *Fraud Tree* atau Peta Kecurangan

Dalam buku *Penganggaran Sektor Publik*, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan skema atau kerangka praktik *fraud* dalam suatu bentuk *fraud tree*. Melalui skema dalam *fraud tree* tersebut dapat lebih memudahkan dalam memahami klasifikasi berbagai bentuk praktik *fraud*. Pada *fraud tree* terdapat tiga cabang utama praktik

¹ Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h.4.

² Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis* (Jakarta : PT. Grasindo, t.th.), h. 74.

³ Program Studi Akuntansi FEB Universitas Ma Chung, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume I* (Malang : Seribu Bintang, 2018), h. 114.

fraud, yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*).⁴

a. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan dalam bentuk ini terdiri atas pencurian uang tunai atau persediaan, *skimming* (pencurian uang lewat mengcapture nomor rekening orang lain), dan penggelapan gaji. *Fraud* jenis ini paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud atau dapat diukur dan dihitung. Contoh *skimming* : pembobolan ATM orang lain.

b. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang serta penyalahgunaan aset organisasi/ instansi pemerintah. Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap, pemberian hadiah, pemerasan dan konflik *interest* (adanya hubungan keluarga). Benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, bentuk dari benturan kepentingan tergantung siapa pelakunya, fenomena di negara kita sering terjadi dilakukan oleh partai politik.

Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Misalnya seorang hakim yang memberikan keputusan memenangkan kamu, padahal kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

⁴ Nurkholis dan Moh Khusaini, *Penganggaran Sektor Publik* (Malang: UB Press, t.th.), h. 154.

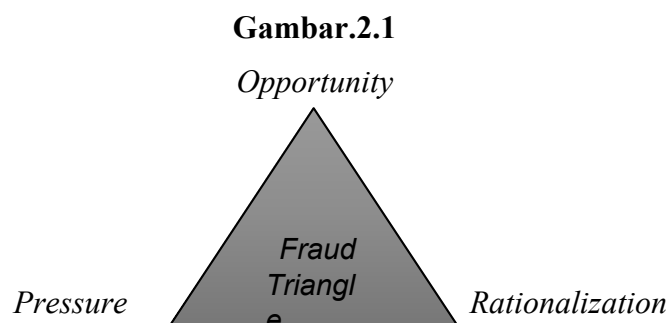
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 188).⁵

c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

Fraud jenis ini ditandai dengan kesengajaan membuat laporan keuangan menjadi salah saji atau kesalahan dalam jumlah yang begitu besar dalam pengungkapan laporan keuangan, dengan maksud menipu pengguna laporan keuangan lebih khusus kecurangan laporan keuangan menyebabkan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi dan dokumen pendukung dalam pembuatan laporan keuangan.

3. *Fraud Triangle*

Fraud triangle merupakan segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya tiga kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) yang ditunjukkan pada gambar.



Sumber : diadaptasi dari Coenen dan Wells

Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁵ Departemen Agama RI Mushaf Standar Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'* (Jakarta : PT. Suara Agung, t.th), h. 29.

Faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Terjadinya ketiga faktor diatas disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dilihat melalui Teori *Fraud Triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey mengatakan bahwa “*fraud* disebabkan oleh tiga hal, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*)”.

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan yang dihadapi seseorang pada umumnya akibat masalah keuangan. Keserakahan, kehidupan diluar jangkauan atau pencapaian angan-angan, tagihan atas utang yang banyak, kredit bermasalah, kerugian atau kehilangan finansial, kebutuhan finansial yang tidak terduga merupakan contoh-contoh tekanan yang dapat mendorong seseorang melakukan *fraud*. Tekanan keuangan merupakan pendorong paling kuat kepada seseorang, atau manajemen perusahaan, untuk melakukan *fraud*, bahkan sekitar 95% *fraud* dilakukan karena masalah keuangan.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Adanya kesempatan membuat seseorang melakukan kecurangan atau korupsi, menyembunyikannya, menghindari hukuman merupakan unsur dari segitiga kecurangan. Terdapat lima faktor yang dapat memberikan kesempatan bagi para individu untuk berbuat kecurangan antara lain :

- 1) Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi perilaku curang.
- 2) Ketidakmampuan dalam memberikan kualitas pekerjaan dan cara menilai kualitas kinerja.
- 3) Terbatasnya akses terhadap informasi
- 4) Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan, dan
- 5) Tidak adanya jejak audit

c. Rasionalisasi

Rasionalisasi memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika. Misalnya orang yang melakukan kegiatan korupsi dan uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk menyantuni fakir miskin atau kegiatan keagamaan atau dengan alasan saya hanya meminjam dari perusahaan dan akan saya kembalikan suatu saat nanti.⁶

Penyebab *fraud* menurut Jack Bologna juga dapat dijelaskan dengan *GONE Theory*, terdiri dari 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang dalam hal ini berperilaku *fraud*. Keempat faktor tersebut adalah :⁷

- a. *Greed* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- b. *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- c. *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
- d. *Exposure* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja, pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan atau mengubah suatu aset

⁶ Maharso, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 51.

⁷ Istiqlal Ramadhan dan Herry Laksito. "Peran Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis Untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan" dalam Diponegoro *Journal Of Accounting*, Vol. 8, no. 4, 2019, h. 4

perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan dan hukum yang berlaku.

4. *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan, yaitu (1) Menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika. (2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintah secara sehat. (3) Membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat. Jenis kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi.

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara tipe korupsi menurut de Asis adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik ke parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.⁸ Tipe korupsi yang terakhir yaitu *clientelism* (pola hubungan langganan).

Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu :⁹

- a. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi

⁸ Ibid., h.21.

⁹ Arie Soelendro, et. al., *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, (Jakarta : BPKP Tim Pengkajian SPKN, 2002), h.6.

kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar.

- b. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan kecenderungan manajemen menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasinya.
- c. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
- d. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

5. *Fraud* Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, *fraud* (kecurangan) merupakan salah satu sifat tercela yang harus dijauhi oleh para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya. Ayat yang menjadi landasan larangan melakukan kecurangan adalah QS. Al-Muthaffifin (83) : 1-6 berikut ini.

- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝
 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝
 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. (QS. Al-Muthaffifin (83) : 1-6).¹⁰

Dalam Islam, ada beberapa jenis kecurangan dari unsur-unsur dan definisi di masa sekarang yaitu :

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Menggelapkan uang Negara dalam Syariat Islam disebut *Al-ghulul*, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum.¹¹

Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk *al-ghulul* , adalah sebagai berikut :

- 1) Mencuri harta rampasan perang (*al-ghulul*)
- 2) Menggelapkan uang dari kas Negara (*baitul maal*)
- 3) Menggelapkan zakat
- 4) Hadiah untuk para pejabat

Adapun dasar hukum *Al-ghulul*, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits. Salah satunya QS. Ali-Imran (3) : 161 berikut ini :

¹⁰ Ibid., h. 588-589.

¹¹ Yurmaini. "Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2017, h.100.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ ۖ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. (QS. Ali-Imran (3) : 161).¹²

Adapun Hadits yang membahas al-ghulul adalah Hadits Riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Latabiyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata, 'Ini adalah hartamu dan ini hadiah.' Spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar: "Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: "Amma ba'd. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan, 'ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku,' kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. "Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknyanya seraya mengatakan: "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?" (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan bahwa pengertian *al-ghulul* tidak terbatas pada lingkup korupsi harta rampasan perang saja, melainkan

¹² Ibid., h.72.

mencakup semua kekayaan publik, yang diambil seorang pejabat secara tidak sah. Seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah Saw kepada Mu'adz yang diangkat menjadi Gubernur Yaman, agar tidak mengambil sesuatu apa pun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah. Jika hal ini tetap dilakukan maka ia melakukan tindakan korupsi.

b. *Risywah* (Suap)

Secara terminologi, *Risywah* (Suap) merupakan suatu penyerahan baik berwujud harta ataupun barang yang diberikan kepada pejabat atau yang memegang kebijakan/kekuasaan demi menghalalkan (atau melancarkan) yang buruk dan mengharamkan yang baik atau memperoleh keuntungan dari cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *Risywah* yaitu “Sesuatu yang diberikan kepada hakim atau seseorang yang memiliki wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya”.¹³

Dapat disimpulkan, *Risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan kepada pejabat atau yang memiliki kekuasaan baik harta atau benda dengan tujuan mengikuti kemauan yang memberikan suap tersebut. Adapun dasar hukum *risywah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 188 yang telah dijelaskan sebelumnya.

c. *Sariqah* (Pencurian)

Sariqah adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.

Adapun dasar hukum dari *Sariqah* (Pencurian) terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5) ayat 38.

¹³ Safuan, et.al. “*Fraud* dalam Perspektif Islam” dalam Jurnal Akuntansi, vol. 5, no. 1, 2021, h. 226.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah (5) : 38).¹⁴

Menurut Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa’i, Ibnu Majah kategori pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan apabila barang yang diambil lebih dari seperempat dinar.

d. *Hirabah*

Dalam hukum Islam, tindak korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirabah*. *Hirabah* adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.¹⁵ Adapun dasar hukum dari *hirabah* terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5) : 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

¹⁴ Ibid., h. 115.

¹⁵ Endang Jumali. “Hirabah dan Hubungannya dengan Hukum Ta’zir Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. Al-Maidah Ayat 33)” dalam Jurnal Asy-Syari’ah, vol. 17, no. 2, 2015, h. 151.

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (QS. Al-Maidah (5) : 33).¹⁶

Hukum asal *hirabah* adalah haram karena mencuri atau merampok harta milik orang lain atau harta milik negara, sedangkan korupsi itu sendiri termasuk bagian dari pencurian atau perampokan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, hukum korupsi adalah haram.

Dengan mengqiyaskan atau menganalogikan korupsi dengan *hirabah* maka hukuman bagi pelaku korupsi dapat pula diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :¹⁷

- 1) Hukuman mati atau tembak mati, apabila korupsi ini dilakukan dalam jumlah yang besar yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas negara dan citra bangsa serta hilangnya kesempatan hidup bagi sebagian rakyat, seperti korupsi dana dalam jumlah puluhan milyar rupiah dan seterusnya.
- 2) Hukuman potong tangan dan kaki secara silang, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah sedikit yang hanya mengakibatkan kerugian material keuangan negara, seperti korupsi dalam jumlah ratusan juta rupiah.
- 3) Dipenjarakan sampai ia tobat, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti dalam jumlah jutaan atau puluhan juta. Korupsi untuk hukuman paling ringan ini hanya

¹⁶ Ibid., h.114.

¹⁷ Ibid., h.153.

ditoleransi karena kebutuhan hidup. Walaupun begitu hukuman penjaranya bisa saja seumur hidup bila hakim melihat bahwa sepantasnya pelaku korupsi dalam jumlah kecil ini diganjar seperti itu.

6. Perilaku Tidak Etis

Buckley menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Meski sulit dalam konteks akuntansi, dan hubungannya dengan pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu dipertimbangkan guna memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya yang berkaitan dengan informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi yang tersedia bagi pasar.¹⁸

Adanya pengaruh etika yang ada dalam diri seorang auditor akan mempengaruhi perilaku auditor dan etis tidaknya keputusan yang diambil. Orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai etika itu sendiri. Perilaku etis seseorang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.

Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Arens dan Loebbecke menyebutkan bahwa, terdapat tiga faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu :

- a. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

¹⁸ Rifqi Mirza Zulkarnain, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 36.

- b. Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.
- c. Rasionalisasi

7. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan sistem Pengendalian internal pemerintah, yaitu :

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua peraturan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.²⁰ Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pengujian pengendalian berkenaan dengan rancangan menitikberatkan apakah pengendalian tersebut dirancang untuk mencegah atau menemukan salah saji atau ketidaktaatan atau permasalahan kinerja. Suatu pengendalian dilaksanakan dengan efektif bila pengendalian tersebut

¹⁹ Faiz Zamzami, et.al., *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sesuai PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), h. 31.

²⁰ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 11.

telah diterapkan secara benar dan konsisten sepanjang tahun oleh pegawai yang diberi wewenang menerapkannya.²¹

Pemahaman yang baik mengenai Pengendalian internal penting bagi akuntan yang berperan sebagai manajer, pengguna, perancang, dan evaluator sistem akuntansi.²²

- a. Tanggung jawab manajer atas Pengendalian internal telah dibuat secara eksplisit di undang-undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 dan standar No.2 *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*.²³ Standar No.2 mengharuskan manajemen untuk membuat sebuah pertanyaan yang menjelaskan dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan.
- b. Pengguna harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga dapat diterapkan dengan tepat.
- c. Akuntan memiliki peran penting sebagai perancang prosedur Pengendalian internal yang mendorong ketaatan terhadap peraturan dan sasaran perusahaan.
- d. Dalam perannya sebagai evaluator, Auditor internal dan auditor eksternal harus memahami sistem Pengendalian internal.

Sistem Pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya :

- a. Menjaga aktiva perusahaan.
- b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.

²¹ Arnida Wahyuni, *Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik* (Medan : t.p, 2018), h. 104.

²² Dasaratha V. Rama, *Accounting Information System*, Terj. Nina Setyaningsih, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta : Salemba Empat, ed 18, 2008), h. 132.

²³ Undang-undang Sarbanes -Oxley dihasilkan dalam pembentukan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), yang diberdayakan untuk mengajukan standar audit perusahaan publik. Security And Exchange Commission harus menyetujui setiap standar agar dapat dilaksanakan. PCAOB menyusun Standar Audit No.2 “Audit atas Pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan dalam hubungannya dengan audit laporan keuangan.” standar ini disetujui oleh SEC dalam rilis No. 34-49884, 17 Juni 2004.

- c. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.
- d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.²⁴

Indikator Pengendalian Internal, menurut *Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO)* pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu:¹²⁵

- a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan Lingkungan perusahaan yang mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan secara umum dan konsep kontrol secara khusus, hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

- b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisa dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

- c. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan berbagai proses upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan

²⁴ *Ibid.*, h. 181.

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h. 70-73.

atau pengendalian operasi perusahaan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal

sebagai berikut :

- 1) Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib
- 2) Pelimpahan tanggung jawab
- 3) Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, dan
- 4) Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

e. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

f. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menentukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

8. Kesesuaian Kompensasi

Handoko mendefinisikan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.²⁶ Pegawai harus diberi imbalan bagi upaya yang telah mereka keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan mereka sendiri. Kompensasi lebih dari sekedar upah dan gaji dalam kompensasi bisa juga termasuk di

²⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Prenamedia Group, 2009), h. 183.

dalamnya insentif dan program kesejahteraan pegawai. Insentif bisa meningkatkan produktivitas. Kompensasi dalam bentuk tunjangan-tunjangan in-natura, fasilitas, perumahan, kendaraan, jaminan sosial, dan lain-lain yang dinilai dengan uang dan cenderung diterima secara tetap.

Kompensasi secara umum tidak lain daripada suatu metode pengadaan dan pemberian balas jasa yang layak kepada karyawan guna tercapainya tujuan perusahaan. Untuk menentukan besarnya balas jasa yang diberikan kepada karyawan biasanya didasarkan pada kondisi dimana perusahaan tersebut berada dan kemampuan keuangan perusahaan.

Dalam pemberian kompensasi kepada karyawan maka perusahaan mengharapkan adanya pengaruh positif terhadap karyawan yang meliputi :

- a. Mendorong semangat dan kegairahan kerja para karyawan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja karyawan.
- c. Sebagai motivasi kerja karyawan.

Agar pemberian kompensasi kepada karyawan tidak diskriminatif maka manajemen perusahaan harus membuat sistem pemberian kompensasi yang mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak ada karyawan yang dirugikan. Sejalan dengan itu Moh. As'ad mengemukakan beberapa sistem pemberian balas jasa yang umum digunakan, yaitu :²⁷

- a. Sistem upah menurut banyaknya produksi (produktivitas)
- b. Sistem upah menurut lamanya bekerja (jam kerja)
- c. Sistem upah menurut lamanya dinas
- d. Sistem upah menurut kebutuhan

Kompensasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kompensasi ekstrinsik, kompensasi intrinsik dan kompensasi non tradisional :²⁸

²⁷ Sanusi Hamid, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan* (Yogyakarta : Deepublish, 2014), h.41.

²⁸ Ibid., h. 42-45.

a. Kompensasi ekstrinsik

Dalam buku *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gibson membagi Kompensasi ekstrinsik terdiri dari kompensasi finansial yang berwujud gaji dan upah, tunjangan, kompensasi antar personal dan promosi.

1) Gaji dan upah adalah bentuk utama kompensasi ekstrinsik. Untuk benar-benar memahami bagaimana uang memodifikasi perilaku, persepsi dan preferensi orang yang diberi kompensasi harus diketahui, yang tentunya merupakan tantangan tugas dari manajer.

2) Tunjangan

Tunjangan utama berbentuk keuangan di organisasi umumnya adalah rencana pensiun. Tetapi beberapa tidak berupa uang seperti: program rekreasi untuk karyawan, jaminan kesehatan dan liburan.

3) Kompensasi antar personal

Dalam konteks kompensasi pengakuan ditujukan pada pemahaman manajerial dari hasil karyawan yang bisa menghasilkan peningkatan status Pengakuan dari top manajer antara lain : pujian di depan public, pernyataan pekerjaan dilakukan dengan baik atau perhatian khusus.

4) Promosi

Bagi karyawan promosi tidak sering terjadi beberapa tidak pernah mengalami. Top manajer membuat keputusan promosi dengan mencoba menyesuaikan orang yang tepat untuk suatu pekerjaan.

b. Kompensasi intrinsik

Kompensasi intrinsik terdiri dari : kompensasi atas penyelesaian suatu pekerjaan, pencapaian tujuan yang menantang, otonomi, dan pertumbuhan pribadi.

1) Peluang Penyelesaian Tugas

Kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan merupakan hal yang penting bagi individu. Akibat dari penyelesaian tugas adalah penghargaan bagi diri sendiri. Peluang

yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas mempunyai efek motivasi yang kuat.

2) Peluang Pencapaian Tujuan Yang Menantang

Pencapaian adalah kompensasi yang diatur sendiri dihasilkan dari pencapaian tujuan yang menantang. Dalam program penetapan tujuan, tujuan yang lebih sulit akan menghasilkan prestasi seseorang sampai pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang biasa saja.

3) Otonomi

Beberapa orang yang menginginkan pekerjaan yang memberi hak membuat keputusan. Mereka ingin beroperasi tanpa adanya pengawasan yang ketat. Perasaan mempunyai otonomi ini bisa menghasilkan suatu keleluasaan melaksanakan apa yang dianggap karyawan terbaik dalam situasi tertentu. Dalam pekerjaan yang sangat terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen menjadi sulit untuk menciptakan suatu tugas-tugas yang memberikan kebebasan hak otonomi.

4) Pertumbuhan pribadi

Seseorang yang mengalami pertumbuhan pribadi dapat merasakan pengembangan mereka dan melihat bagaimana kemampuan mereka menjadi lebih besar. Dengan memperluas kemampuan karyawan dapat memaksimalkan atau tidaknya memuaskan potensi keterampilan.

c. Kompensasi Non Tradisional

Kompensasi non tradisional terdiri dari : tunjangan gaya kafetaria, menabung cuti kerja, pembayaran berdasarkan keterampilan, dan pembagian hasil.

1) Tunjangan gaya kafetaria

Dalam gaya kafetaria karyawan diminta memutuskan apa yang ingin mereka terima dari jumlah total tunjangan. Karyawan mengembangkan sendiri secara pribadi, paket tunjangan yang

secara pribadi menarik. Beberapa karyawan mengambil semua tunjangan dalam bentuk kas, lainnya mengambil proteksi kesehatan.

2) Menabung cuti kerja

Banyak perusahaan mempunyai sistem cuti kerja yang masuk dalam program cuti. Karyawan menerima sejumlah waktu cuti yang berbeda didasarkan pada lama kerja di organisasi.

3) Pembayaran berdasarkan keterampilan

Pembayaran meningkat dihubungkan pada setiap set keterampilan baru yang dikuasai karyawan. Program ini mempunyai beberapa manfaat. Keuntungan utama adalah lebih ahli dan fleksibelnya pekerja. Produktivitas meningkat dan biaya pengawasan dapat dikurangi. Karyawan dapat lebih dimotivasi guna memperoleh dan menggunakan keterampilannya mereka acapkali menerima pembayaran secara lebih adil.

4) Pembagian hasil

Merupakan suatu formula yang didasarkan pada rencana insentif kelompok dimana karyawan menyumbang pada pemerolehan pendapatan perusahaan dari peningkatan prestasi mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena adanya tekanan bahwa pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sehingga kesesuaian kompensasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai, dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang) yang diterima para pegawai sebagai balas jasa atas kerja yang diberikannya terhadap perusahaan sebagai timbal balik dari

pekerjaan mereka. Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan, sehingga tinggi rendahnya kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pemicu terjadinya kecurangan (*fraud*) di berbagai sektor. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Hildan Zaka Firdaus (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/ <i>Fraud</i> Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada	Sama-sama menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis.	Penelitian ini tidak terdapat variabel perilaku tidak etis dan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Sedangkan penelitian saya	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>), penegakan hukum/peraturan dan kesesuaian

²⁹ Usman, *Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur*, h. 30.

		Pemerintahan di Kabupaten Klaten)		terdapat variabel perilaku tidak etis dan sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.	kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>), dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>).
2.	Syahrani Usman (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur).	Sama-sama menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.	Penelitian ini tidak terdapat variabel perilaku tidak etis dan sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. Sedangkan penelitian saya terdapat variabel	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, penegakan hukum dan komitmen organisasi

				<p>perilaku tidak etis dan sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Sedangkan penelitian saya merupakan penelitian asosiatif.</p>	<p>berpengaruh secara signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>
	Deviana sari (2016)	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung : Persepsi</p>	<p>Sama-sama menggunakan skala Likert untuk pengukuran variabel.</p>	<p>Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis full model SEM (<i>Struktural Equation Modelling</i>) dengan smart PLS versi 5.0.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>, keefektifan sistem</p>

		Pegawai Pemerintahan		Sedangkan penelitian saya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan <i>software</i> SPSS versi 20.0.	pengendalian internal dan perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> , penegakan hukum dan kultur organisasi berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> .
4.	Rifqi Mirza Zulkarnain (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)	Sama-sama menggunakan variabel perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi.	Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis full model SEM (<i>Struktural Equation Modelling</i>) dengan smart PLS. Sedangkan penelitian saya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan,

				<p><i>software</i> SPSS versi 20.0. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan <i>quota sampling</i> sedangkan penelitian saya menggunakan metode <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan tidak terdapat pengaruh antara kultural organisasi dan penegakan hukum dengan <i>fraud</i> sektor pemerintahan</p>
5.	Pramudita (2013)	Analisis <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga.	Sama-sama menggunakan variabel kesesuaian kompensasi.	<p>Penelitian ini tidak terdapat variabel perilaku tidak etis. Sedangkan penelitian saya terdapat variabel perilaku tidak etis. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis full model SEM</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan,</p>

				<p>(<i>Struktural Equation Modelling</i>) dengan smart PLS. Sedangkan penelitian saya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan <i>software</i> SPSS versi 20.0. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan <i>convenience sampling</i> sedangkan penelitian saya menggunakan metode <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dan penegakan hukum dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>
--	--	--	--	---	---

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah gambaran menyeluruh penelitian yang terdiri dari konsep atau teori yang menjadi acuan dalam penelitian. Secara singkat kerangka teoritis adalah membahas saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi penelitian.

1. Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecurangan (*fraud*).

2. Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat.³⁰ Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf x. variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi.

3. Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa.

Penelitian Rifqi mirza zulkarnain menemukan pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian Deviana sari menemukan pengaruh negatif perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

³⁰Arfan ikhsan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*(Bandung : Citapustaka Media, 2014), h. 67.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengujian pengendalian berkenaan dengan rancangan menitikberatkan apakah pengendalian tersebut dirancang untuk mencegah atau menemukan salah saji atau ketidaktaatan atau permasalahan kinerja. Suatu pengendalian dilaksanakan dengan efektif bila pengendalian tersebut telah diterapkan secara benar dan konsisten sepanjang tahun oleh pegawai yang diberi wewenang menerapkannya.³¹ Penelitian Pramudita menemukan pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

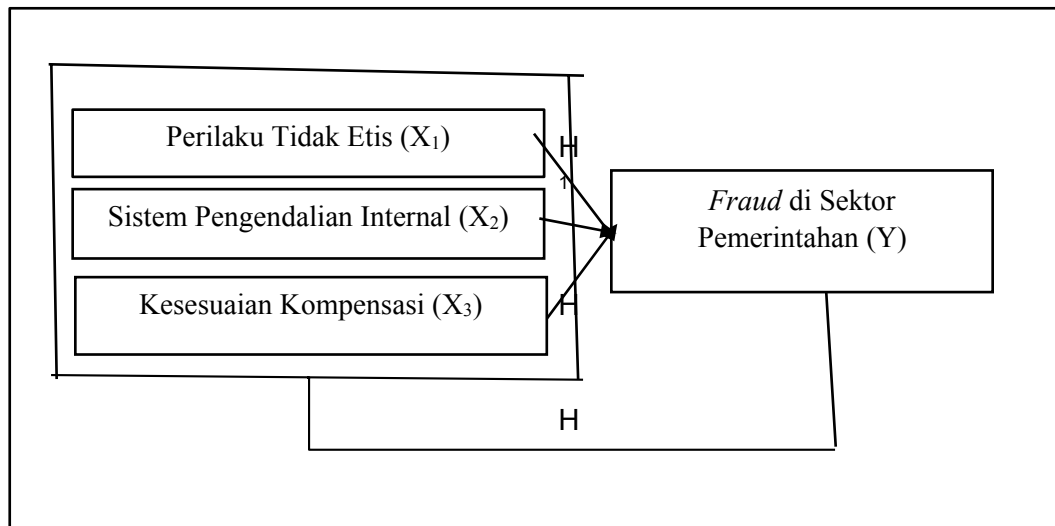
5. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Kompensasi secara umum tidak lain daripada suatu metode pengadaan dan pemberian balas jasa yang layak kepada karyawan guna tercapainya tujuan perusahaan. Kompensasi lebih dari sekedar upah dan gaji dalam kompensasi bisa juga termasuk di dalamnya insentif dan program kesejahteraan pegawai.

Penelitian M. Hildan zaka firdaus menemukan tidak ada pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian Syahriani usman menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

³¹ Ibid.

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Terdapat dua hipotesis di dalam penelitian yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menolak dugaan peneliti, sebaliknya hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menerima prediksi penelitian.³²

Berdasarkan dengan permasalahannya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

H_{a1} : Terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

³² Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : Prenamedia Group ,2018), h. 75.

- H₀₂ : Tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- H_{a2} : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- H_{a3} : Terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- H₀₄ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
- H_{a4} : Terdapat pengaruh signifikan antara perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.¹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap variabel dependen yaitu *fraud* di sektor pemerintahan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 18 Gedung PT. Bank Sumut Lantai 7. Waktu penelitian bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan										
		2019		2020								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1	Tahap Persiapan	■										
2	Pengajuan Judul	■										
3	Penyusunan Proposal		■	■	■	■						
4	Seminar Proposal						■					

¹ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi* (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h. 119.

5	Pelaksanaan Penelitian											
6	Penyusunan Laporan											
7	Seminar Akhir											

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.² Populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 123 pegawai.

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi.³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.⁴ Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan.

Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 pegawai.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, cet 19. 2013), h. 80.

³ *Ibid.*, h. 81.

⁴ Syamsuni, *Statistik dan Metodologi Penelitian* (Jawa Timur :CV. Karya Bakti Makmur, 2019), h. 172.

D. Data Penelitian

Untuk menganalisis dan menginterpretasikannya dengan baik serta untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat maka diperlukan data yang valid dan dapat dipercaya.⁵ Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan cara memberikan kuesioner kepada pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷ Penelitian pustaka ini memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, website resmi, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (primer) dengan menggunakan metode *survey* atau kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan atau ditulis sebelumnya oleh

⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

⁶ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika : Untuk Ekonomi & Keuangan Modern* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 2.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Kuesioner dalam penelitian ini berisi tentang persepsi karyawan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*. Kuesioner disebarakan secara langsung kepada responden melalui perwakilan yang ditunjuk untuk menyebarkan kuesioner, dan responden diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

Dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala Likert, dimana pada penelitian ini penulis menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan dengan tanda *checkbox* pada jawaban yang telah disediakan. Jawaban setiap item pertanyaan akan dinilai dengan menggunakan angka penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skor Penilaian

No	Kategori Jawaban	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Netral (N)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

Objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja dalam jangka waktu minimal 5 tahun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Defenisi	Dimensi	Indikator	Skala
1.	Perilaku Tidak Etis (X ₁)	Perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan. ● Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan. ● Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. ● Perilaku manajemen yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan 2. Dapat merugikan perekonomian negara 3. Menggunakan sumberdaya organisasi untuk kepentingan pribadi 	Likert

			<p>tidak berbuat apa-apa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perilaku manajemen yang mengabaikan peraturan. 	<p>4. Mampu melaporkan orang yang melakukan kecurangan di dalam perusahaan tetapi tidak mau melakukannya</p> <p>5. Gaya hidup yang terlalu tinggi</p> <p>6. Penegakan peraturan yang tidak maksimal</p>	
2.	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta	<p>Lingkungan pengendalian</p> <hr/> <p>Manajemen Resiko</p>	<p>1. Mampu menciptakan suasana yang baik di dalam perusahaan.</p> <p>2. Menetapkan corak organisasi</p> <p>3. Mampu mempengaruhi orang-orang yang berada di lingkungan organisasi</p> <hr/> <p>1. Pelaporan keuangan sesuai</p>	Likert

		memastikan bahwa semua peraturan hukum/ undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan.		dengan prinsip akuntansi 2. Mempertimbangkan biaya masalah dan manfaat yang akan dicapai	
			Informasi dan komunikasi	1. Mampu memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang membutuhkan 2. Dapat menjalin komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal organisasi	
			Aktivitas pengendalian	1. Meyakini bahwa resiko yang diambil dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan 2. Meminimalkan resiko dengan mengikuti	

				arahan manajemen	
			Pemantauan dan <i>monitoring</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menilai kualitas kinerja 2. Menerapkan sistem pemantauan yang efektif dan efisien 	
3.	Kesesuaian Kompensasi (X ₃)	Suatu metode pengadaan dan pemberian balas jasa yang layak kepada karyawan guna tercapainya tujuan perusahaan.	Kompensasi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan tambahan gaji atau bonus sesuai dengan pekerjaan pegawai 2. Memberikan asuransi kepada karyawan 	Likert
			Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pujian 2. Memberikan hadiah 	
			Promosi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu membuat karyawan lebih diunggulkan 2. Mampu meningkatkan 	

				kinerja karyawan supaya lebih giat	
			Penyelesaian tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap waktu yang diberikan 2. Bertanggung jawab dengan hasil yang dikerjakan 	
			Pencapaian sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kinerja 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Memberikan dukungan dan penghargaan 	

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu proses penyederhanaan data penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan cara penyajian ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data

dalam bentuk tabel numerik dan grafik seperti rata-rata, median, modus, dispersi, dan koefisien korelasi.⁸

2. Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan, maka diperlukan uji validitas dan reliabilitas. Terdapat dua jenis uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini :

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengukur kebenaran data yang akan diteliti pada kuesioner tersebut.⁹ Teknik pengujian validitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan *software* SPSS versi 20.0. Untuk mengetahui penelitian valid atau tidak, dengan kriteria sebagai berikut:
Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut valid.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau *construct*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.¹⁰ Pengujian data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 20.0 yang memberikan fasilitas *Cronbach Alpha (a)*. Butir pertanyaan yang sudah

⁸ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan : Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta : Kencana, 2019), h. 168.

⁹ Neliwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori dan Praktek)* (Medan, CV. Widya Puspita, 2018), h. 162.

¹⁰ Ibid., h. 91.

dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut : Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang efisien, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.¹¹

Untuk mendeteksi normalitas dapat menggunakan analisis grafik normal *P-plot of regression standardized residual*. Deteksinya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dari analisis grafik tersebut adalah:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.¹²

Dan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan ketentuan data berdistribusi normal apabila nilai asymp. sig. (2-tailed) > 0,05.

¹¹ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta : Deepublish, 2019), h. 114

¹² Imam Ghozali, *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2016), h.154

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang dapat dikatakan baik atau tidak. Serta menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal atau terjadi kesalahan. Alat yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya gangguan multikolinieritas adalah *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

- 1) Jika nilai $VIF < 10$, maka artinya tidak terjadi multikolinieritas pada data yang diuji.

Jika nilai $VIF > 10$, maka artinya terjadi multikolinieritas pada data yang diuji.

$$\text{Rumus: } VIF = 1 / (1 - R^2)$$

- 2) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas pada data yang diuji.

Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ maka artinya terjadi multikolinieritas pada data yang diuji.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan nilai residualnya (*SRESID*). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit maka

telah terjadi heteroskedastisitas.¹³ Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara berikut.

- 1) Jika nilai *Deviation from Linearity Sig* > 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Jika nilai *Deviation from Linearity Sig* < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar hubungan antara dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel, atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Model ini digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud*. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : *Fraud* Di Sektor Pemerintahan

¹³ Ibid., h. 120-122

X_1 : Perilaku Tidak Etis

X_2 : Sistem Pengendalian Internal

X_3 : Kesesuaian Kompensasi

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

e : Tingkat Kesalahan

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien dari determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 sama dengan nol ($R^2 = 0$) menunjukkan tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R^2 semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila R^2 mendekati 0 maka menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji t (*t-test*)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji ini pada *software* SPSS versi 20.0 dapat dilihat pada *tabel coefficients*.

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.¹⁴

c. Uji F (*F test*)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasilnya dapat diketahui dari hasil perhitungan program SPSS versi 20.0, sebagai berikut.

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

¹⁴ Ibid., h. 97

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut Keresidenan, yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) No.10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing - masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22 /Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang RI No.24 tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh. Motto Daerah, adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

Sementara BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Utara adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang baru dibentuk berdasarkan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan pergantian nama yang baru di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sebelum berganti nama menjadi BPKAD adalah dulunya dinamakan Biro Keuangan. Sedangkan ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari eks Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setda Provinsi Sumatera Utara dan sebagian berada di Biro Umum.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara adalah :

a. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

b. Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 3) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

3. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

a. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan Aset.
 - b) Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu.
 - b) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
 - c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
 - d) Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
 - e) Penyelenggaraan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f) Penyelenggaraan sistem informasi publik.
 - g) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat.
 - b) Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan.
 - c) Menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada sekretariat.
 - f) Menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan sekretariat.
 - g) Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi sekretariat
 - h) Menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sekretariat.
 - i) Menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan sekretariat
 - j) Menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan sekretariat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - k) Menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan
 - l) Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat internal dan eksternal
 - m) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - n) Menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan
 - o) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan
- 4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

c. Bidang Pengelolaan Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi :
 - a) Penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran.
 - b) Penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun Rancangan APBD dan perubahan APBD.
 - c) Penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD.
 - d) Penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai uraian tugas :
 - a) Menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - b) Menyelenggarakan verifikasi RKA-SKPD/RKA-PPKD.
 - c) Menyelenggarakan verifikasi DPA-SKPD/DPA-PPKD, DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dan DPA-L.
 - d) Menyelenggarakan konsep SPD.
 - e) Menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah.
 - f) Menyelenggarakan informasi anggaran daerah.
 - g) Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.

- 4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi

Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala badan dalam penyelenggaraan urusan perbendaharaan dan kas daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan kas daerah mempunyai fungsi :
 - a) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Perbendaharaan dan kas daerah.
 - b) Penyelenggaraan pengolahan data bidang perbendaharaan dan kas daerah.
 - c) Penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah.
 - d) Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
 - e) Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan kas daerah mempunyai uraian tugas :
 - a) Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
 - b) Menyelenggarakan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya.
- d) Menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e) Menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah.
- f) Menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- g) Menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- h) Menyelenggarakan persiapan dan penerbitan SKPP.
- i) Menyelenggarakan pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- j) Menyelenggarakan penyusunan laporan aliran kas.
- k) Menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK.
- l) Menyelenggarakan pengelolaan piutang dan utang daerah.
- m) Menyelenggarakan pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah.
- n) Menyelenggarakan pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D dengan instansi terkait.
- o) Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek.
- p) Menyelenggarakan pelaksanaan konsultasi dan asistensi pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.
- q) Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah

antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga perbankan, pemerintah kabupaten/kota.

- r) Menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan kas daerah.
 - s) Menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu.
 - t) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan dan kas daerah dibantu :
- a) Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c) Sub Bidang Kas Daerah

e. Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera utara.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 - c) Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah.

- d) Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan.
 - e) Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas :
- a) Menyelenggarakan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b) Menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c) Menyelenggarakan evaluasi terhadap konsep dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - d) Menyelenggarakan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - e) Menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - f) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah.
 - g) Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan.
 - h) Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
- 4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :
- a) Sub Bidang Akuntansi I
 - b) Sub Bidang Akuntansi II

c) Sub Bidang Akuntansi III

f. Bidang Aset BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, Pengelolaan aset serta penghapusan aset Pemerintah Provinsi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah (BMD)/Aset.
 - b) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
 - c) Penyelenggaraan monitoring, penelitian dan evaluasi terhadap barang milik daerah.
 - d) Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan terhadap barang dan data barang milik daerah.
 - e) Penyelenggaraan bimbingan teknis, konsultasi dan asistensi dalam rangka penataan administrasi, pengembangan dan peningkatan urusan pengelolaan barang milik daerah.
 - f) Penyelenggaraan konsep ketentuan dan peraturan tentang barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g) Penyelenggaraan dan membantu pejabat penatausahaan barang milik daerah sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - h) Penyelenggaraan pembinaan dan penataan administrasi dalam penyelenggaraan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Aset mempunyai uraian tugas :

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang aset.
- b) Menyelenggarakan pengolahan bahan, data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah.
- c) Menyelenggarakan penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang aset.
- d) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, monitoring, investigasi dan evaluasi, pengelolaan dan kebijakan penyelenggaraan urusan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
- e) Menyelenggarakan pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang setiap tahun anggaran.
- f) Menyelenggarakan, meneliti RKA dan DPA SKPD berpedoman pada daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang telah ditetapkan.
- g) Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi pengelolaan aset provinsi, Kab/Kota dan BUMD Provinsi, sesuai ketentuan peraturan-undangan.
- h) Menyelenggarakan penatausahaan, penggolongan dan kodifikasi barang daerah/aset sesuai standar yang ditetapkan.
- i) Menyelenggarakan penetapan status penggunaan barang daerah kepada unit pemakai barang hasil pengadaan/pembelian, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- j) Menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik, dalam penyelenggaraan bidang aset sesuai ketentuan perundang-undangan.
- k) Menyelenggarakan penyusunan standar satuan harga sesuai peraturan perundang-undangan.
- l) Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- m) Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan penjualan barang milik daerah secara langsung atau lelang umum, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- n) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, penilaian dan atau penaksiran terhadap barang milik daerah dengan pihak lain, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- o) Menyelenggarakan penyusunan laporan barang persediaan dan aset tetap di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- p) Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan tahunan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- q) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan melakukan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD atas usulan SKPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- r) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penaksiran harga BMD dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD, sesuai ketentuan yang berlaku.
- s) Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengembangan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.

- t) Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan atas penyelenggaraan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.
 - u) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal di bidang aset.
 - v) Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - w) Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - x) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - y) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Aset dibantu oleh :
- a) Sub Bidang Analisis dan kebutuhan aset.
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Aset
 - c) Sub Bidang Penghapusan Aset.

g. Bidang Bina Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- 1) Membantu Kepala Badan untuk urusan pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota Wilayah
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota penyelenggaraan fungsi, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan pergelaran keuangan daerah terhadap 33 Pemerintah Kabupaten/Kota

- b) Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD terhadap 33
 - c) Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 Kabupaten/Kota
 - d) Fasilitas kebutuhan Pemerintah Pusat Terhadap data Keuangan daerah 33 Kabupaten/Kota
 - e) Fasilitas penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah terbagi 33 Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kota
 - f) Menjelaskan hal-hal terkait Konsultasi dan Koordinasi kepada 33 Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kota
 - g) Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam penerapan sanksi administrasi kepada 33 Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah
 - h) Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan
 - i) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang fungsinya
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas :
- a) Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan perubahan APBD terhadap 33 Kabupaten/Kota
 - c) Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 Kabupaten/Kota

- d) Memfasilitasi kebutuhan pemerintah pusat terhadap data keuangan daerah 33 Kabupaten/Kota
 - e) Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota
 - f) Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan koordinasi kepada 33 DPRD Kabupaten/Kota
 - g) Merupakan perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah
 - h) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Bina Keuangan Daerah
 - i) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah
 - j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah
- 4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dibantu oleh :
- a) Sub Bidang Bina Keuangan I
 - b) Sub Bidang Bina Keuangan II
 - c) Sub Bidang Bina Keuangan III

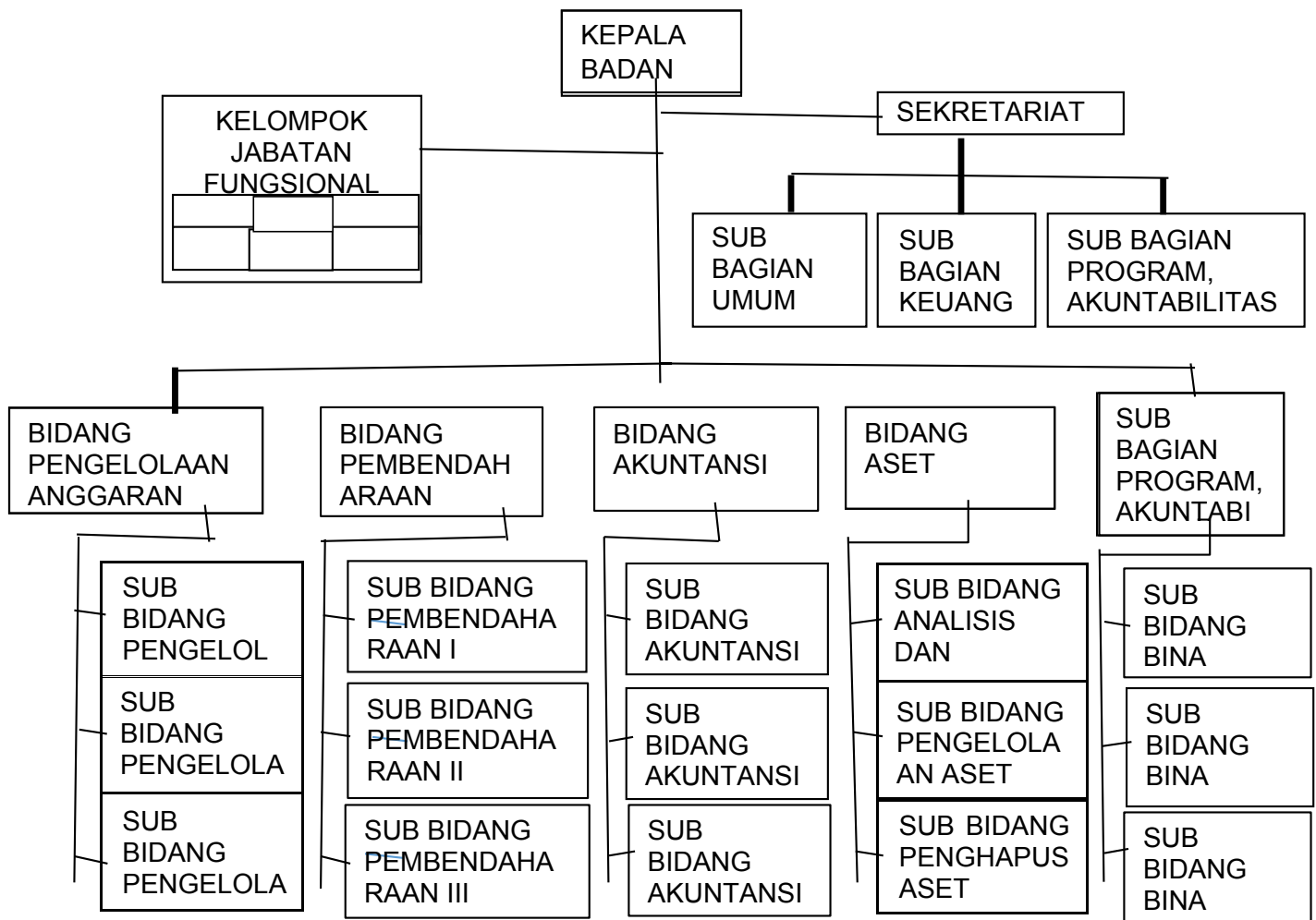
4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara

Adapun yang menjadi struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAGAN ORGANISASI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprovsu

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, kuesioner yang dibagikan sebanyak 60 atau 100% dan jumlah kuesioner yang kembali 50 atau 83,3%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 9 atau 15% dan yang tidak dapat diolah karena pengisian jawaban tidak lengkap sebanyak

1 atau 1,7%. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	60	100%
2	Kuesioner yang kembali	50	83,3%
3	Kuesioner yang tidak kembali	9	15%
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	1	1,7%

Sumber : Data primer yang diolah

1. Karakteristik Responden

Di bawah ini peneliti akan menguraikan penyajian data dalam berbagai karakteristik yaitu sebagai berikut :

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pria	30	60,0	60,0	60,0
Valid Wanita	20	40,0	40,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dari data pada tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden sebesar 60% atau sebanyak 30 orang berjenis kelamin pria, dan 40% atau 20 orang berjenis kelamin wanita.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Deskriptif responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
30-34	7	14,0	14,0	14,0
35-39	13	26,0	26,0	40,0
Valid d 40-44	12	24,0	24,0	64,0
45-49	7	14,0	14,0	78,0
>50	11	22,0	22,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari data pada tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden sebesar 14% atau sebanyak 7 orang berusia 30-34 tahun, 26% atau 13 orang berusia 35-39 tahun, 24% atau 12 orang berusia 40-44 tahun, 14% atau 7 orang berusia 45-49 tahun dan 22% atau 11 orang berusia 50 tahun keatas.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	10	20,0	20,0	20,0
Diplo ma	7	14,0	14,0	34,0
Valid S1	25	50,0	50,0	84,0
S2	8	16,0	16,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari data pada tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden sebesar 20% atau sebanyak 10 orang berijazah SMA, 14% atau 7 orang berijazah Diploma, 50% atau 25 orang berijazah S1, dan 16% atau 8 orang berijazah S2.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Deskriptif responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
8-12	26	52,0	52,0	52,0
13-17	7	14,0	14,0	66,0
18-22	2	4,0	4,0	70,0
Valid d 23-27	1	2,0	2,0	72,0
28-32	5	10,0	10,0	82,0
>33	9	18,0	18,0	100,0
Tot al	50	100,0	100,0	

Sumber : Data Diolah Dengan SPSS

Dari data pada tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa dari 50 responden, sebesar 52% atau sebanyak 26 orang telah bekerja selama 8-12 tahun, 14% atau 7 orang telah bekerja selama 13-17 tahun, 4% atau 2 orang telah bekerja selama 18-22 tahun, 2% atau 1 orang telah bekerja selama 23-27 tahun, 10% atau 5 orang telah bekerja selama 28-32 tahun, dan 18% atau 9 orang telah bekerja selama 33 tahun keatas.

2. Deskripsi Variabel

a. Perilaku Tidak Etis

Dalam hal ini dikemukakan kuesioner mengenai perilaku tidak etis atau bukti fisik yang merupakan variabel bebas dari penelitian, sebagaimana terlihat pada tabel hasil distribusi jawaban responden perilaku tidak etis.

Tabel 4.6

Distribusi Jawaban Responden Perilaku Tidak Etis

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1.1	0	0	11	22	28	56	11	22	0	0	50	100
X1.2	0	0	11	22	7	14	11	22	21	42	50	100
X1.3	0	0	11	22	28	56	0	0	11	22	50	100
X1.4	11	22	33	66	6	12	0	0	0	0	50	100
X1.5	0	0	33	66	17	34	0	0	0	0	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 diatas variabel perilaku tidak etis maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Pernyataan X1.1, mayoritas responden sebanyak 28 responden (56%) menyatakan netral bahwa suatu hal yang wajar menggunakan (kendaraan dinas, *fotocopy* kantor, dsb) untuk keperluan pribadi.
- 2) Pernyataan X1.2, mayoritas responden sebanyak 21 responden (42%) menyatakan sangat setuju bahwa kepala bidang akuntansi berusaha untuk tidak menerima berbagai pembayaran fiktif yang ada di perusahaan.
- 3) Pernyataan X1.3, mayoritas responden sebanyak 28 responden (56%) menyatakan netral bahwa kepala badan berani menolak

permintaan kepala daerah untuk pembelian aset yang tidak sesuai/melebihi batas anggaran.

- 4) Pernyataan X1.4, mayoritas responden sebanyak 33 responden (66%) menyatakan tidak setuju bila kepala bidang meminta tiket liburan kepada *supplier* bila barang pasokannya digunakan untuk keperluan dinas pemerintah.
- 5) Pernyataan X1.5, mayoritas responden sebanyak 33 responden (66%) menyatakan tidak setuju bahwa seringkali para pegawai diam saja bila pegawai lain bertindak sangat merugikan di lingkungan instansi.

b. Sistem Pengendalian Internal

Dalam hal ini dikemukakan kuesioner mengenai sistem pengendalian internal atau bukti fisik yang merupakan variabel bebas dari penelitian, sebagaimana terlihat pada tabel hasil distribusi jawaban responden sistem pengendalian internal.

Tabel 4.7

Distribusi Jawaban Responden Sistem Pengendalian Internal

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X2.1	0	0	41	82	9	18	0	0	0	0	50	100
X2.2	0	0	40	80	10	20	0	0	0	0	50	100
X2.3	0	0	22	44	6	12	22	44	0	0	50	100
X2.4	0	0	30	60	6	12	14	28	0	0	50	100
X2.5	0	0	12	24	14	28	12	24	12	24	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diatas variabel sistem pengendalian internal maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Pernyataan X2.1, mayoritas responden sebanyak 41 responden (82%) menyatakan tidak setuju bahwa penerapan wewenang dan tanggung jawab tidak terlalu dipentingkan.
- 2) Pernyataan X2.2, mayoritas responden sebanyak 40 responden (80%) menyatakan tidak setuju bahwa bila laporan keuangan perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti pendukung dapat diabaikan.
- 3) Pernyataan X2.3, mayoritas responden sebanyak 22 responden (44%) menyatakan tidak setuju dan setuju bahwa pemeriksaan fisik atas kekayaan perusahaan (kas, persediaan, dll) hanya pada saat diperlukan.
- 4) Pernyataan X2.4, mayoritas responden sebanyak 30 responden (60%) menyatakan tidak setuju bahwa sistem akuntansi tidak dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional perusahaan.
- 5) Pernyataan X2.5, mayoritas responden sebanyak 14 responden (28%) menyatakan netral bahwa diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal (misalnya derajat keamanan kas, persediaan, dsb).

c. Kesesuaian Kompensasi

Dalam hal ini dikemukakan kuesioner mengenai kesesuaian kompensasi atau bukti fisik yang merupakan variabel bebas dari penelitian, sebagaimana terlihat pada tabel hasil distribusi jawaban responden kesesuaian kompensasi.

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Kesesuaian Kompensasi

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X3.1	0	0	0	0	25	50	25	50	0	0	50	100
X3.2	0	0	0	0	25	50	25	50	0	0	50	100
X3.3	0	0	0	0	25	50	25	50	0	0	50	100
X3.4	0	0	0	0	28	56	11	22	11	22	50	100
X3.5	0	0	0	0	27	54	11	22	12	24	50	100
X3.6	0	0	0	0	27	54	11	22	12	24	50	100
X3.7	0	0	11	22	28	56	11	22	0	0	50	100
X3.8	0	0	25	50	25	50	0	0	0	0	50	100
X3.9	0	0	22	44	6	12	11	22	11	22	50	100
X3.10	0	0	11	22	17	34	22	44	0	0	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 diatas variabel kesesuaian kompensasi maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Pernyataan X3.1, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50%) menyatakan setuju bahwa kompensasi keuangan yang instansi berikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai.
- 2) Pernyataan X3.2, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50%) menyatakan setuju bahwa instansi menciptakan kondisi sehingga diakui bahwa semua pegawainya memang menguasai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- 3) Pernyataan X3.3, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50%) menyatakan setuju bahwa promosi/ kenaikan jabatan di

instansi ini diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai oleh para pegawai.

- 4) Pernyataan X3.4, mayoritas responden sebanyak 28 responden (56%) menyatakan netral bahwa instansi dikelola oleh manajemen yang baik sehingga para pegawai memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik.
- 5) Pernyataan X3.5, mayoritas responden sebanyak 27 responden (54%) menyatakan netral bahwa pekerjaan sebagai penanggung jawab penyusunan laporan keuangan merupakan tugas yang menantang yang harus dicapai dalam waktu tertentu.
- 6) Pernyataan X3.6, mayoritas responden sebanyak 27 responden (54%) menyatakan netral bahwa penanggung jawab penyusunan laporan keuangan dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dibidangnya.
- 7) Pernyataan X3.7, mayoritas responden sebanyak 28 responden (56%) menyatakan netral bahwa gaji yang diberikan telah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang saya lakukan sebagai pegawai pemerintah.
- 8) Pernyataan X3.8, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50%) menyatakan tidak setuju bahwa instansi selalu memberikan imbalan tunai dalam setiap kegiatan (kepanitiaan) yang berada di luar jam kerja.
- 9) Pernyataan X3.9, mayoritas responden sebanyak 22 responden (44%) menyatakan tidak setuju bahwa bila pegawai bekerja melebihi waktu kerja (lembur) maka ada insentif tersendiri yang diberikan oleh instansi.
- 10) Pernyataan X3.10, mayoritas responden sebanyak 22 responden (44%) menyatakan setuju bahwa tunjangan pegawai yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan.

d. *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Dalam hal ini dikemukakan kuesioner mengenai *fraud* di sektor pemerintahan atau bukti fisik yang merupakan variabel bebas dari penelitian, sebagaimana terlihat pada tabel hasil distribusi jawaban responden *fraud* di sektor pemerintahan.

Tabel 4.9

Distribusi Jawaban Responden *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y.1	11	22	22	44	17	34	0	0	0	0	50	100
Y.2	0	0	44	88	6	12	0	0	0	0	50	100
Y.3	11	22	22	44	17	34	0	0	0	0	50	100
Y.4	0	0	25	50	25	50	0	0	0	0	50	100
Y.5	0	0	33	66	17	34	0	0	0	0	50	100
Y.6	0	0	33	66	17	34	0	0	0	0	50	100
Y.7	12	24	12	24	14	28	12	24	0	0	50	100
Y.8	0	0	25	50	25	50	0	0	0	0	50	100
Y.9	0	0	11	22	39	78	0	0	0	0	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 diatas variabel *fraud* di sektor pemerintahan maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Pernyataan Y.1, mayoritas responden sebanyak 17 responden (34%) menyatakan netral bahwa merupakan suatu hal yang wajar apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya.
- 2) Pernyataan Y.2, mayoritas responden sebanyak 44 responden (88%) menyatakan tidak setuju bahwa bukan suatu masalah apabila

pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang.

- 3) Pernyataan Y.3, mayoritas responden sebanyak 22 responden (44%) menyatakan tidak setuju bahwa suatu hal yang wajar apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/ perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi.
- 4) Pernyataan Y.4, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50%) menyatakan tidak setuju bahwa suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai kedalam belanja peralatan gedung kantor.
- 5) Pernyataan Y.5, mayoritas responden sebanyak 33 responden (66%) menyatakan tidak setuju bahwa suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran menggunakan kwitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor.
- 6) Pernyataan Y.6, mayoritas responden sebanyak 33 responden (66%) menyatakan tidak setuju bahwa bukan suatu masalah apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli.
- 7) Pernyataan Y.7, mayoritas responden sebanyak 14 responden (28%) menyatakan netral bahwa bukan suatu masalah apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda.
- 8) Pernyataan Y.8, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50%) menyatakan tidak setuju bahwa suatu hal yang wajar apabila ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung.
- 9) Pernyataan Y.9, mayoritas responden sebanyak 39 responden (78%) menyatakan netral bahwa bukan suatu masalah apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan r_{tabel} (pearson correlation) dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Item pernyataan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berikut ini adalah hasil uji validitas dari setiap instrumen pernyataan dengan nilai r_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 0,279.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
Perilaku Tidak Etis	X1.1	0,777	0,000	Valid
	X1.2	0,869	0,000	Valid
	X1.3	0,865	0,000	Valid
	X1.4	0,526	0,000	Valid
	X1.5	0,443	0,001	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0,442	0,001	Valid
	X2.2	0,510	0,000	Valid
	X2.3	0,809	0,000	Valid
	X2.4	0,797	0,000	Valid
	X2.5	0,704	0,000	Valid
	X3.1	0,791	0,000	Valid
	X3.2	0,799	0,000	Valid
	X3.3	0,791	0,000	Valid

Kesesuaian Kompensasi	X3.4	0,806	0,000	Valid
	X3.5	0,813	0,000	Valid
	X3.6	0,813	0,000	Valid
	X3.7	0,719	0,000	Valid
	X3.8	0,375	0,007	Valid
	X3.9	0,696	0,000	Valid
	X3.10	0,733	0,000	Valid
Kecurangan/ Fraud	Y.1	0,641	0,000	Valid
	Y.2	0,589	0,000	Valid
	Y.3	0,717	0,000	Valid
	Y.4	0,660	0,000	Valid
	Y.5	0,752	0,000	Valid
	Y.6	0,788	0,000	Valid
	Y.7	0,647	0,000	Valid
	Y.8	0,682	0,000	Valid
	Y.9	0,582	0,000	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dari setiap variabel penelitian adalah valid. Hal ini dapat dilihat pada nilai r hitung > r tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Perilaku Tidak Etis	0,752	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Internal	0,667	Reliabel
3	Kesesuaian Kompensasi	0,889	Reliabel
4	Kecurangan / <i>Fraud</i>	0,810	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel, karena mempunyai nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

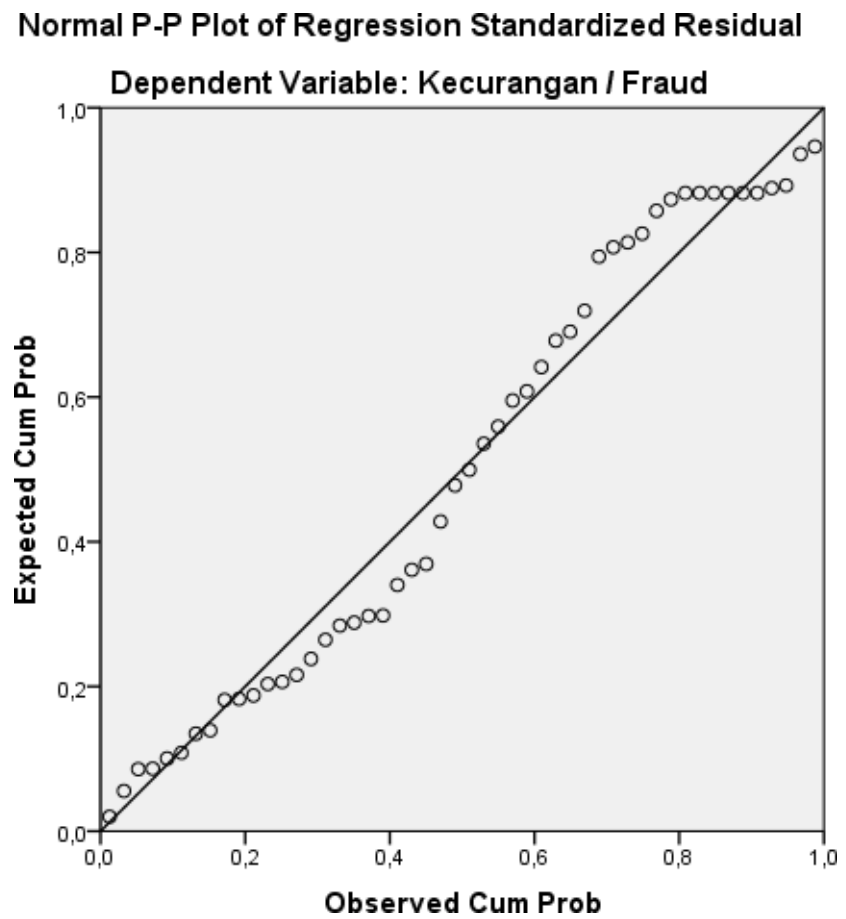
D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.¹ Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik normal *P-plot of regression standardized residual* dan non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

¹ Ibid

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot



Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,10571720
	Absolute	,122
Most Extreme Differences	Positive	,108
	Negative	-,122
Kolmogorov-Smirnov Z		,860
Asymp. Sig. (2-tailed)		,451

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena titik-titiknya menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dan dari tabel 4.12 diatas hasil uji K-S diketahui bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar $0,451 > 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Adapun hasil uji multikolinieritas tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20,595	3,351		6,147	,000		
Perilaku Tidak Etis	,176	,185	,146	,953	,346	,693	1,442
Sistem Pengendalian Internal	,540	,221	,397	2,439	,019	,615	1,625
Kesesuaian Kompensasi	-,271	,094	-,404	-2,892	,006	,836	1,195

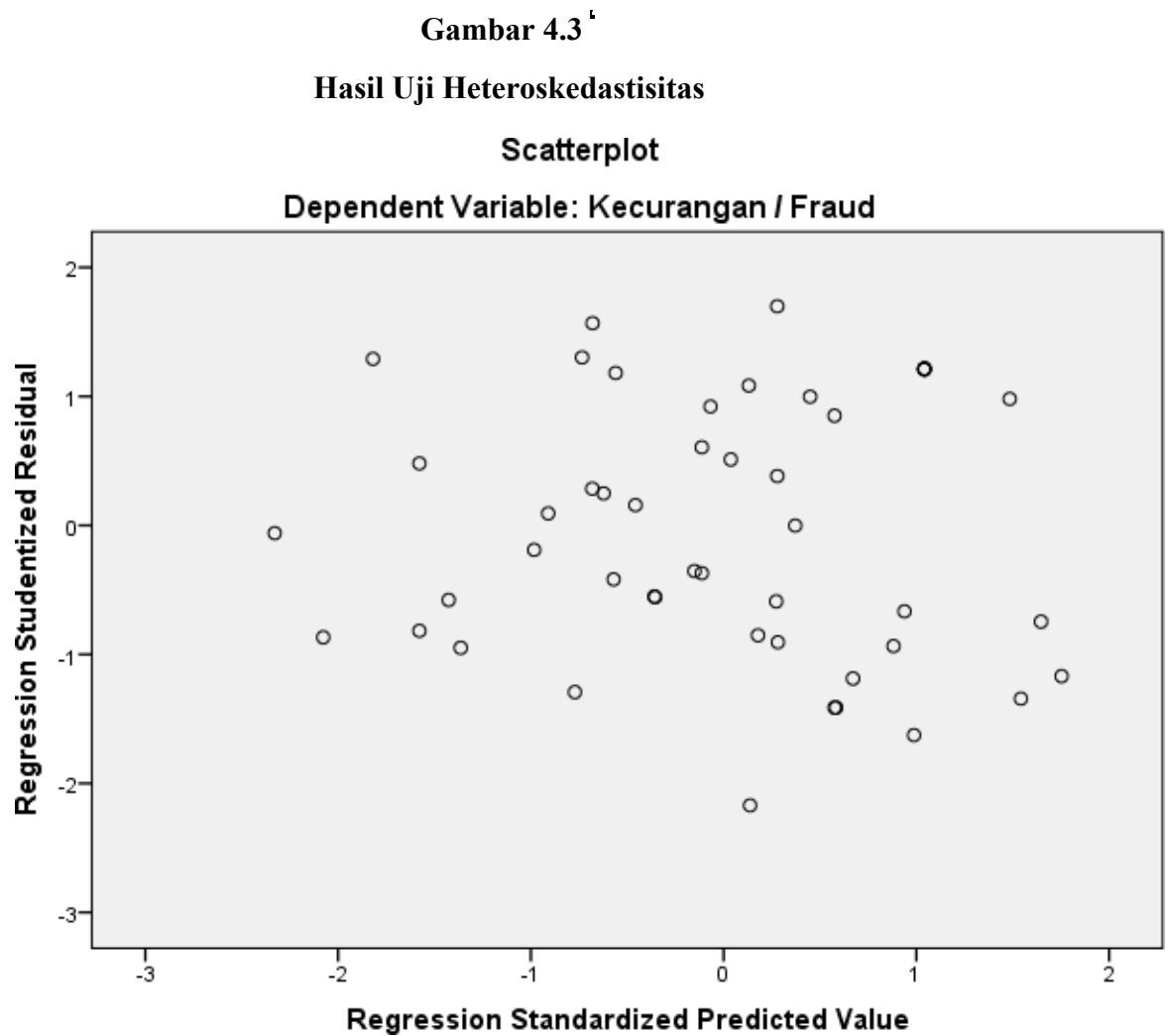
a. *Dependent Variable:* Kecurangan / Fraud

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas tersaji dalam tabel berikut ini.



Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

4. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun hasil uji linearitas tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji Linearitas

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Kecurangan / Fraud * Kesesuaian Kompensasi	(Combined)	378,970	16	23,686	3,123	,003
	Between Groups	27,369	1	27,369	3,609	,066
	Deviation from Linearity	351,601	15	23,440	3,091	,003
	Within Groups	250,250	33	7,583		
	Total	629,220	49			

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai *Deviation from Linearity Sig* > 0,05, maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap variabel terikat yaitu *Fraud* di Sektor Pemerintahan. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 20,595 + 0,176X_1 + 0,540X_2 - 0,271X_3$$

Y : *Fraud* Di Sektor Pemerintahan

X₁ : Perilaku Tidak Etis

X₂ : Sistem Pengendalian Internal

X₃ : Kesesuaian Kompensasi

Maka berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS dapat disajikan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20,595	3,351		6,147	,000
1 Perilaku Tidak Etis (X1)	,176	,185	,146	,953	,346
Sistem Pengendalian Internal (X2)	,540	,221	,397	2,439	,019
Kesesuaian Kompensasi (X3)	-,271	,094	-,404	-2,892	,006

a. Dependent Variable: Kecurangan / *Fraud* (Y)

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Konstanta (a) = 20,595, ini menunjukkan nilai *constant*, dimana jika variabel Perilaku Tidak Etis (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Kesesuaian Kompensasi (X3) = 0, maka *Fraud* = 31,395.
- 2) Koefisien X1 (β_1) = 0,176, ini berarti bahwa variabel Perilaku Tidak Etis (X1) berpengaruh positif terhadap *Fraud*, atau dengan kata lain jika Perilaku Tidak Etis (X1) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka *Fraud* mengalami peningkatan sebesar 0,176. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Perilaku Tidak Etis dengan

Fraud, semakin meningkat Perilaku Tidak Etis maka akan semakin meningkat pula *Fraud* di BPKAD Sumatera Utara.

- 3) Koefisien X_1 (β_2) = 0,540, ini berarti bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) berpengaruh positif terhadap *Fraud*, atau dengan kata lain jika Sistem Pengendalian Internal (X_2) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka *Fraud* mengalami peningkatan sebesar 0,540. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Sistem Pengendalian Internal dengan *Fraud*, semakin meningkat Sistem Pengendalian Internal maka akan semakin meningkat pula *Fraud* di BPKAD Sumatera Utara.
- 4) Koefisien X_3 (β_3) = -0,271, ini berarti bahwa variabel Kesesuaian Kompensasi (X_3) berpengaruh negatif terhadap *Fraud*, atau dengan kata lain jika Kesesuaian Kompensasi (X_3) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka *Fraud* akan mengalami penurunan sebesar -0,271. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel Kesesuaian Kompensasi dengan *Fraud*, semakin meningkat Kesesuaian Kompensasi maka akan semakin menurun pula *Fraud* di BPKAD Sumatera Utara.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila R^2 mendekati 0 maka menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji determinasi tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.16

Uji R²*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,499 ^a	,249	,200	3,205

a. Predictors: (Constant), Kesesuaian Kompensasi (X3), Perilaku Tidak Etis (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, besarnya angka koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,249 atau 24,9%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 24,9% *Fraud* di sektor Pemerintahan yang terjadi dapat dijelaskan dengan variabel Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi. Sementara sisanya, yaitu 75,1% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.

2. Uji t (*t-test*)

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun hasil uji t tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	20,595	3,351		
	Perilaku Tidak Etis (X1)	,176	,185	,146	,953
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	,540	,221	,397	,019
	Kesesuaian Kompensasi (X3)	-,271	,094	-,404	,006

a. Dependent Variable: Kecurangan / Fraud (Y)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a) Nilai signifikansi variabel Perilaku Tidak Etis (X1) adalah sebesar 0,346, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} sebesar 0,953 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,678 hasil tersebut menunjukkan bahwa Perilaku Tidak Etis (X1) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima.
- b) Nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) adalah sebesar 0,019, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} sebesar 2,439 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,678, hasil tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.

- c) Nilai signifikansi variabel Kesesuaian Kompensasi (X3) adalah sebesar 0,006, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar -2,892 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,678, maka dapat dikatakan bahwa Kesesuaian Kompensasi (X3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

3. Uji F (*F test*)

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Adapun hasil uji F tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.18

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	156,592	3	52,197	5,080	,004 ^b
	Residual	472,628	46	10,275		
	Total	629,220	49			

a. *Dependent Variable:* Kecurangan / *Fraud* (Y)

b. *Predictors:* (*Constant*), Kesesuaian Kompensasi (X3), Perilaku Tidak Etis (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa di dapat nilai F_{hitung} sebesar 5,080 dengan probabilitas 0,004. Karena probabilitas 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 5,080 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,81, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi

berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan, sehingga membuktikan bahwa Ha4 diterima dan H04 ditolak.

F. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan. Maka dalam penelitian ini diperoleh data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dan mengumpulkan kembali. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program *software SPSS versi 20*.

1) Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku tidak etis tidak mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan secara signifikan. Karena signifikansi perilaku tidak etis yang berkaitan dengan *fraud* di sektor pemerintahan sebesar 0,346, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} sebesar 0,953 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,678. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Perilaku Tidak Etis (X1) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan (Y), sehingga membuktikan bahwa Ha1 ditolak dan H01 diterima.

Dalam teori *fraud triangle* perilaku tidak etis diproksikan ke dalam rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar. Perilaku tidak etis dalam suatu organisasi disebabkan sikap dan tanggung jawab moral manajemen dalam suatu organisasi. Moralitas merupakan suatu hal yang mempengaruhi perilaku seorang individu. Karena moralitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Moralitas yang buruk akan membuat individu cenderung berperilaku tidak etis. Dalam suatu organisasi atau instansi yang diwakili manajemennya, moralitas manajemen merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh setiap pegawai dalam suatu instansi. Sehingga dalam suatu perusahaan

atau instansi, moralitas manajemen memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis yang dilakukan instansi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Mirza Zulkarnain yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dan Deviana Sari menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan secara signifikan. Karena signifikansi sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan *fraud* di sektor pemerintahan sebesar 0,019, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 2,439 lebih besar dari t tabel sebesar 1,678, hasil tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.

Sistem Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan *fraud*. *Fraud* dapat terjadi apabila ada peluang. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang efektif. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan teori *fraud triangle* yaitu adanya peluang (*opportunity*) yang merupakan faktor pemicu pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Jika terdapat peluang, seorang pegawai yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan *fraud* akan cenderung melakukan *fraud*. Peluang muncul melalui kelemahan dalam pengawasan sistem pengendalian internal suatu instansi. Agar berjalan efektif suatu sistem pengendalian intern harus memiliki kualitas yang baik serta

didukung oleh kepatuhan para pegawai terhadap sistem pengendalian tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Mirza Zulkarnain dan Deviana Sari yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

3) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan secara signifikan. Karena signifikansi kesesuaian kompensasi yang berkaitan dengan *fraud* di sektor pemerintahan sebesar 0,006, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar -2,892 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,678, maka dapat dikatakan bahwa Kesesuaian Kompensasi (X3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor Pemerintahan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena adanya tekanan bahwa pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sehingga kesesuaian kompensasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai, dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrani Usman yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

4) Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan secara simultan, yaitu dapat diketahui bahwa di dapat nilai F_{hitung} sebesar 5,080 dengan probabilitas 0,004. Karena probabilitas 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan F_{hitung} sebesar 5,080 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,81, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud* di sektor Pemerintahan, sehingga membuktikan bahwa H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Hasil uji determinan R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai determinasi (R^2) adalah sebesar 0,249 atau 24,9%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 24,9% *fraud* di sektor Pemerintahan yang terjadi dapat dijelaskan dengan variabel Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi. Sementara sisanya, yaitu 75,1% harus dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti penegakan hukum, kultur organisasi, asimetri informasi, dan keefektifan pengendalian internal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 pegawai yang bekerja di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal tersebut membuktikan bahwa jika seluruh pegawai berperilaku etis tidak dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
3. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian promosi, kompensasi ataupun bonus yang sesuai kepada pegawai berpengaruh terhadap perilaku kecurangan (*fraud*).
4. Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi BPKAD Provinsi Sumatera Utara diharapkan untuk terus menerapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal.
2. Perlu adanya peninjauan lebih dalam dari pihak pengawas, agar lebih teliti dalam mengawasi seluruh pegawai tanpa memandang status jabatan lebih tinggi atau lebih rendah.
3. Untuk para akademisi mahasiswa, maupun peneliti agar terus mengkaji dan mengembangkan serta menyempurnakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Mengembangkan penelitian dapat diarahkan pada eksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan. Menambah jumlah sampel dan memperluas wilayah sampel penelitian, serta menggunakan teori yang lebih baru selain *fraud triangle*.
4. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih akurat seperti wawancara langsung sehingga responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, Tungga dan Anantawikrama. *Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Jakarta : Kencana, 2019
- Departemen Agama RI Mushaf Standar Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*, Jakarta : PT. Suara Agung, t.th)
- Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2019
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2016
- Hamid, Sanusi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*, Yogyakarta : Deepublish, 2014
- Hery. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014
- Ikhsan, Arfan, et.al. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung : Citapustaka Media, 2014
- Ismail, Fajri. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Prenamedia Group ,2018
- Mirza Zulkarnain, Rifqi. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Mulyana, Asep N. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Jakarta : PT. Grasindo, t.th
- Neliwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori dan Praktek)* (Medan, CV. Widya Puspita, 2018), h. 162.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. *Penganggaran Sektor Publik*, Malang : UB Press, t.th
- Priantara, Diaz. *Fraud Auditing & Investigation*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013

- Program Studi Akuntansi FEB Universitas Ma Chung. *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 1*, Malang : Seribu Bintang, 2018
- Rama, Dasaratha V. *Accounting Information System*, Terj. Nina Setyaningsih, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat, 2008
- Ramadhan, Istiqlal dan Herry Laksito. “Peran Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis Untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan”, dalam Diponegoro *Journal Of Accounting*, vol. 8, no. 4, 2019
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan : Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019
- Sari, Deviana. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung : Persepsi Pegawai Pemerintahan”, Tesis, Universitas Lampung, 2016
- Soelendro, Arie, et. al. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta : BPKP Tim Pengkajian SPKN, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, cet 19. 2013
- Suharyadi dan Purwanto. *Statistika : Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*, Jakarta : Salemba Empat, 2009
- Sujarweni, Wiratna. *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015
- Sulistiyowati, Firma. “Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi”, dalam Jurnal JAAI Vol. 11, no. 1, Juni 2007
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Prenamedia Group, 2009
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi*, Jakarta : Prenamedia Group, 2015
- Syamsuni. *Statistik dan Metodologi Penelitian*, Jawa Timur : CV. Karya Bakti Makmur, 2019
- Tarigan, Azhari Akmal, et.al., *Pedoman Penulisan Proposal dan skripsi Ekonomi Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013

- Usman, Syariani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Wahyuni, Arnida. *Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik*, Medan. t.p, 2018
- Wexley dan Yuki. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003
- Wilopo. "Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan", dalam Jurnal Ventura Vol. 11, no. 1, April 2008
- Zamzami, Faiz et.al. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sesuai PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014
- Batubara, Putranegara. "Terjerat Suap APBD, 7 Anggota DPRD Sumut Segera Diseret ke Meja Hijau", <http://nasional.okezone.com>. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2020.
- Ihsanuddin. "Mendagri Nilai Korupsi di Daerah Bisa Terjadi Karena Kelemahan Sistem", <http://kompas.com>. Diunduh pada tanggal 15 April 2020.
- "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018", <http://www.medan.bpk.go.id>. Diunduh pada tanggal 22 September 2020.
- Prayitno. "KPK : Pegawai Titip Absen Pecat Saja", <http://www.rmoljateng.com>. Diunduh pada tanggal 22 September 2020.

Lampiran 1

Surat Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
Fax: (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 - 1361 /BKB.P/VII/2020

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-1882/EB.I/KS.02/06/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

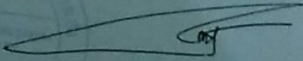
a.Nama : Rida Hayani
b.Alamat : Jl. Surya Haji No. 20 Lau Dandang
c.Pekerjaan : Mahasiswa
d.Nip/Nim/KTP : 0502161005
e.Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara).
f.Lokasi/Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu

4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku


5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 28 Juli 2020
An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN
KEWASPADAAN NASIONAL


BUDIANTO TAMBUNAN,SE,MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan
1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Pertiinggal

Surat Telah Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7
 Bpkadprovsu@gmail.com

MEDAN

Medan, 4 September 2020

<p>Nomor : 071/1601/Sat- Lampiran : Perihal : Telah Selesai Penelitian</p>	<p>Kepada Yth : Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di - <u>Medan</u></p>
--	--

Dengan Hormat,

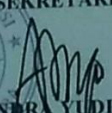
Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070-1361/BKB.P/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-1882/EB.I/KS.02/06/2020 tanggal 20 Juli 2020, tentang Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama	: Rida Hayani
NIM	: 0502161005
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Judul	: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian, selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

ii.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 SEKRETARIS,



Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19670818 199401 1 002

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Pertinggal

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara).

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan (studi pada kantor gubernur sumatera utara). Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya dan menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sejujurnya, dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan kerahasiaannya akan dijaga sesuai dengan etika penelitian. Terima kasih atas kerjasama dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini.

1. Identitas Responden

Nama* :
 (*Boleh tidak di isi)

Jenis Kelamin :

Umur : (Tahun)

Jabatan :

Masa Kerja..... (Tahun)

Pendidikan Terakhir :

2. Petunjuk Pengisian

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Saudara. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda checklist (\checkmark) pada pilihan yang tersedia berikut :

Penilaian

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No	Perilaku Tidak Etis	STS	TS	N	S	SS
1	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar menggunakan (kendaraan dinas, fotocopy kantor, dsb) untuk keperluan pribadi					
2	Di instansi tempat saya bekerja, kepala bidang akuntansi berusaha untuk tidak menerima berbagai pembayaran fiktif yang ada di perusahaan.					
3	Di instansi tempat saya bekerja, kepala badan berani menolak permintaan kepala daerah untuk pembelian aset yang tidak sesuai/ melebihi batas anggaran.					
4	Di instansi tempat saya bekerja, wajar bila kepala bidang meminta tiket liburan kepada supplier bila barang pasokannya digunakan untuk keperluan dinas pemerintah.					
5	Di instansi tempat saya bekerja, sering kali para pegawai diam saja bila pegawai lain bertindak sangat merugikan di lingkungan instansi.					

No	Sistem Pengendalian Internal	STS	TS	N	S	SS
6	Di instansi tempat saya bekerja, penerapan wewenang dan tanggung jawab tidak terlalu dipentingkan.					
7	Di instansi tempat saya bekerja, bila laporan keuangan perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti pendukung dapat diabaikan.					
8	Di instansi tempat saya bekerja, pemeriksaan fisik atas kekayaan perusahaan (kas, persediaan, dll) hanya pada saat diperlukan.					
9	Di instansi tempat saya bekerja, sistem akuntansi tidak dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional perusahaan.					
10	Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal (misalnya derajat keamanan kas, persediaan, dsb).					

No	Kesesuaian Kompensasi	STS	TS	N	S	SS
11	Di instansi tempat saya bekerja, kompensasi keuangan yang instansi berikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai.					

12	Di Instansi tempat saya bekerja, menciptakan kondisi sehingga diakui bahwa semua pegawainya memang menguasai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.					
13	Promosi/ kenaikan jabatan di instansi ini diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai oleh para pegawai.					
14	Di instansi tempat saya bekerja, dikelola oleh manajemen yang baik sehingga para pegawai memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik.					
15	Di instansi tempat saya bekerja , pekerjaan sebagai penanggungjawab penyusunan laporan keuangan merupakan tugas yang menantang yang harus dicapai dalam waktu tertentu.					
16	Di instansi tempat saya bekerja, penanggungjawab penyusunan laporan keuangan dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dibidangnya.					
17	Di instansi tempat saya bekerja, gaji yang diberikan telah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang saya lakukan sebagai pegawai pemerintah.					
18	Di instansi tempat saya bekerja, instansi selalu memberikan imbalan tunai dalam					

	setiap kegiatan (kepanitiaan) yang berada di luar jam kerja.					
19	Di instansi tempat saya bekerja, bila pegawai bekerja melebihi waktu kerja (lembur) maka ada insentif tersendiri yang diberikan oleh instansi.					
20	Di instansi tempat saya bekerja, tunjangan pegawai yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan.					

No	Kecurangan (<i>Fraud</i>)	STS	TS	N	S	SS
21	Di instansi tempat saya bekerja, merupakan suatu hal yang wajar apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya.					
22	Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu masalah apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang.					
23	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/ perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi.					
24	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai kedalam belanja peralatan gedung kantor.					

25	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor.					
26	Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu masalah apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli.					
27	Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu masalah apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda.					
28	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung.					
29	Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu masalah apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus.					

Lampiran 3

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perilaku Tidak Etis

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	,659**	,588**	,315*	0,127	,777**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0,026	0,378	0
	N	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	,659**	1	,718**	0,211	0,168	,869**
	Sig. (2-tailed)	0		0	0,142	0,245	0
	N	50	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	,588**	,718**	1	0,275	0,258	,865**
	Sig. (2-tailed)	0	0		0,053	0,071	0
	N	50	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	,315*	0,211	0,275	1	,492**	,526**
	Sig. (2-tailed)	0,026	0,142	0,053		0	0
	N	50	50	50	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	0,127	0,168	0,258	,492**	1	,443**
	Sig. (2-tailed)	0,378	0,245	0,071	0		0,001
	N	50	50	50	50	50	50
TotalX1	Pearson Correlation	,777**	,869**	,865**	,526**	,443**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0,001	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics x1

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	5

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	,807**	0,166	,347*	0,015	,442**
	Sig. (2-tailed)		0	0,248	0,014	0,917	0,001
	N	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	,807**	1	0,213	,408**	0,055	,510**
	Sig. (2-tailed)	0		0,137	0,003	0,707	0
	N	50	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	0,166	0,213	1	,580**	,465**	,809**
	Sig. (2-tailed)	0,248	0,137		0	0,001	0
	N	50	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	,347*	,408**	,580**	1	,323*	,797**
	Sig. (2-tailed)	0,014	0,003	0		0,022	0
	N	50	50	50	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	-0,015	0,055	,465**	,323*	1	,704**
	Sig. (2-tailed)	0,917	0,707	0,001	0,022		0
	N	50	50	50	50	50	50
TotalX2	Pearson Correlation	,442**	,510**	,809**	,797**	,704**	1
	Sig. (2-tailed)	0,001	0	0	0	0	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics x2

Cronbach's Alpha	N of Items
,667	5

X3.8	Pearson Correlation	0,12	0,12	0,12	0,074	0,169	0,169	,543**	1	,311*	,281*	,375**
	Sig. (2-tailed)	0,406	0,406	0,406	0,611	0,242	0,242	0		0,028	0,048	0,007
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.9	Pearson Correlation	,377**	,475**	,377**	,336*	,361*	,361*	,494**	,311*	1	,619**	,696**
	Sig. (2-tailed)	0,007	0	0,007	0,017	0,01	0,01	0	0,028		0	0
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.10	Pearson Correlation	,384**	,384**	,384**	,431**	,533**	,533**	,578**	,281*	,619**	1	,733**
	Sig. (2-tailed)	0,006	0,006	0,006	0,002	0	0	0	0,048	0		0
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TotalX3	Pearson Correlation	,791**	,799**	,791**	,806**	,813**	,813**	,719**	,375**	,696**	,733**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0	0	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics x3

Cronbach's Alpha	N of Items
,889	10

Y.8	Pearson Correlation	0,271	,369**	,325*	,440**	,464**	,464**	,436**	1	,531**	,682**
	Sig. (2-tailed)	0,057	0,008	0,021	0,001	0,001	0,001	0,002		0	0
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y.9	Pearson Correlation	,348*	0,196	,413**	0,241	,279*	,381**	,295*	,531**	1	,582**
	Sig. (2-tailed)	0,013	0,172	0,003	0,091	0,05	0,006	0,038	0		0
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TotalY	Pearson Correlation	,641**	,589**	,717**	,660**	,752**	,788**	,647**	,682**	,582**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Reliability Statistics y

Cronbach's Alpha	N of Items
,810	9

Lampiran 4

Hasil Jawaban Responden

Responden	Perilaku Tidak Etis (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	5	5	2	2	18
2	3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	2	2	11
4	3	3	3	3	3	15
5	3	4	3	2	2	14
6	2	3	3	1	3	12
7	4	5	3	1	2	15
8	2	2	2	2	2	10
9	3	5	5	2	3	18
10	3	3	3	3	3	15
11	3	4	3	2	2	14
12	4	5	5	2	3	19
13	2	2	2	1	2	9
14	3	4	3	1	2	13
15	4	4	5	2	2	17
16	4	4	3	2	2	15
17	3	2	2	1	2	10
18	3	4	3	1	2	13
19	4	5	3	2	3	17
20	4	5	3	2	2	16
21	3	3	3	3	3	15
22	4	5	5	2	2	18
23	2	2	2	1	2	9
24	3	5	3	2	2	15
25	3	4	3	2	3	15
26	2	4	3	2	2	13
27	2	2	2	1	2	9
28	2	4	3	2	2	13
29	2	2	2	1	2	9
30	3	5	3	2	2	15
31	4	5	5	2	3	19
32	2	2	2	1	2	9
33	3	5	5	2	3	18
34	3	4	3	2	2	14
35	2	2	2	1	2	9

36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	3	5	5	2	3	18
39	3	5	3	2	3	16
40	3	5	3	2	3	16
41	4	5	5	2	2	18
42	4	5	3	2	2	16
43	3	5	3	2	2	15
44	3	4	3	2	2	14
45	3	5	3	2	3	16
46	2	2	2	2	2	10
47	3	5	3	2	2	15
48	3	5	5	2	2	17
49	3	2	2	2	2	11
50	3	5	5	2	2	17

Responden	Sistem Pengendalian Internal (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	2	2	4	4	4	16
2	3	3	3	3	3	15
3	2	2	2	2	2	10
4	3	3	3	3	3	15
5	2	2	2	2	3	11
6	2	2	4	2	5	15
7	2	2	4	4	4	16
8	2	2	2	2	5	13
9	2	2	4	4	5	17
10	3	3	3	3	3	15
11	2	2	2	2	4	12
12	2	2	4	4	4	16
13	2	2	2	2	5	13
14	2	2	4	4	4	16
15	2	2	4	4	2	14
16	2	2	2	2	2	10
17	2	2	2	2	3	11
18	2	2	2	2	3	11
19	2	2	4	2	2	12
20	2	2	4	2	4	14
21	3	3	3	3	3	15
22	2	2	4	2	2	12

11	4	4	4	5	4	4	3	2	2	2	34
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
13	3	3	3	3	5	5	3	2	2	3	32
14	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
15	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
16	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
17	4	4	4	5	5	5	3	2	5	4	41
18	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
19	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
20	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	42
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
22	3	3	3	3	3	3	3	2	5	3	31
23	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	32
24	4	4	4	4	5	5	4	2	2	3	37
25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	37
26	4	4	4	5	5	5	3	2	2	4	38
27	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	31
28	4	3	4	4	5	5	3	3	2	4	37
29	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	35
30	4	4	4	4	3	3	3	2	2	4	33
31	4	4	4	5	5	5	4	3	5	4	43
32	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
33	4	4	4	4	3	3	3	2	5	3	35
34	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	27
35	3	3	3	3	3	3	3	2	5	4	32
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
38	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
39	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	31
40	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	40
41	4	4	4	3	3	3	3	3	4	2	33
42	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28
43	4	4	4	3	3	3	4	2	5	4	36
44	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	27
45	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	42
46	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
47	4	4	4	5	5	5	3	2	5	4	41
48	4	4	4	5	5	5	4	3	5	4	43
49	3	4	3	3	5	5	3	3	5	4	38
50	4	4	4	5	4	4	2	2	2	2	33

40	3	2	2	2	3	3	4	3	3	25
41	2	2	2	2	2	2	2	3	3	20
42	2	2	3	3	3	2	3	3	3	24
43	3	2	2	3	3	3	3	3	3	25
44	1	2	1	2	2	2	4	3	3	20
45	2	2	1	3	2	2	3	3	3	21
46	1	2	1	3	3	2	3	2	2	19
47	2	2	2	3	3	2	4	2	3	23
48	2	2	2	3	2	3	4	3	3	24
49	1	2	1	2	2	2	1	2	2	15
50	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rida Hayani
2. NIM : 0502161005
3. Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Tiram, 20 Agustus 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Sukarela Timur, Kel. Laut Dendang, Kab. Deli Serdang

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 010166 Bogak Berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMPN 1 Tanjung Tiram Berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMAN 1 Tanjung Tiram Berijazah tahun 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Kordinator DPP KAMMI Merah Saga (2019-2020)
2. Sekretaris DPP IPMBB UINSU (2018-2019)
3. Biro Kestari KAMMI Merah Saga (2017-2019)